

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan kabupaten dan kota menjadi lebih besar sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal mendasar dalam Undang-Undang ini adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.²

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini diharapkan memberi kemungkinan yang lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki akses langsung kepada pemerintahan dan begitu sebaliknya. Hal ini diperlukan guna merangsang munculnya partisipasi yang luas dalam membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan.

Dalam proses pembangunan, hal ini merupakan kebijakan yang baik untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik dan

¹Haw, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006 Hlm 5

²*Ibid.* Hlm. 8

sangat membatasi daerah-daerah dalam mengurus dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri, dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diharapkan daerah-daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya serta mengembangkan sikap kerja keras dan kemandirian.

Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara³.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut William N. Dunn yang mengatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat.⁴

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴Drs, AG Subarsono, 2005 . Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, Terjemahan, Hal. 24-25

Perbandingan Kebijakan Publik (CPP) merupakan suatu metode kebijakan publik yang mengadopsi sebuah pendekatan komparasi dalam suatu proses kebijakan dan output serta hasil dari suatu kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, menjadi mudah untuk dipahami bahwa area kajian perbandingan kebijakan publik melingkupi wilayah yang sangat luas yang terkait dengan wilayah negara-kebangsaan dan masalah atau persoalan-persoalan publik yang dihadapi oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Luasnya bidang kajian dari disiplin ini telah menyebabkan perbandingan kebijakan publik telah menjadi kajian yang semakin menarik dan menantang dewasa ini di lingkungan administrasi publik. Hal ini bukan saja karena adanya fenomena globalisasi yang telah menjadi keniscayaan yang ditunjang oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, dimana batas-batas yurisdiksi negara-kebangsaan satu dengan yang lainnya menjadi sangat relatif. Akan tetapi juga, karena alasan bahwa negara (pemerintah) merupakan lembaga yang secara sah melahirkan apa yang disebut sebagai kebijakan publik.⁵

Kebijakan publik adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, kebijakan publik yang dihasilkan oleh negara (pemerintah) mencerminkan kapasitas dan performance dari negara yang bersangkutan. Dalam percaturan global dewasa ini, keunggulan setiap negara ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya. Selain daripada itu, perkembangan terakhir dalam era globalisasi ini juga menunjukkan, bahwa "pasar" yang selama ini selalu

⁵ Bambang Utoyo , *Kajian Perbandingan Kebijakan Pemerintahan Lokal dan Strategi Partisipasi Publik*. Vol 3, No. 7, Juli- Desember 2009 di akses Februari 2017

diagung-agungkan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, yang terjadi justru ”mendikte” persoalan dan kepentingan publik.⁶

Pemberlakuan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan harapan kepada daerah untuk mengurus dan menata wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya keberhasilan pembangunan nasional harus ditopang oleh keberhasilan pembangunan di daerah.

Disisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut juga merupakan sebuah tantangan, dimana daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatifitas lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut daerah perlu menghimpun berbagai harapan dan kepentingan dengan melibatkan seluruh stakeholder . Sebagai langkah awal perwujudan dari harapan ke depan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu dan pengalokasian sumberdaya, dan dalam kenyataannya waktu dan sumberdaya yang ada sangat terbatas untuk mencapai suatu tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem dan

⁶ Ibid., Vol 3 No. 7

periode perencanaan pembangunan sehingga pengalokasian waktu dan sumberdaya dimaksud berjalan secara efektif, efisien dan transparan.⁷

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, target penurunan kemiskinan pada tahun 2009 ditetapkan sebesar 8,2 % dari total jumlah penduduk Indonesia. Sejalan dengan itulah salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu adalah penghapusan kemiskinan.⁸

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Acuan dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM adalah

⁷ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2010 hal 1 tahun 2005

⁸ Liyana Apriyanti, *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan dokumen perencanaan induk yang berwawasan waktu 20 tahun.

Acuan utama penyusunan RPJM adalah rumusan dari visi, misi, arah kebijakan dan Rencana Program indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah secara langsung.

Disamping itu, penyusunan RPJM Daerah ini juga mengacu pada RPJM Nasional dan rancangan awal RPJM Propinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Selanjutnya, karena RPJM yang berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunannya juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah.

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia semakin pentingnya maka melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 juncto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).⁹

Selanjutnya Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 15 Tahun 2010 tentang TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua daerah, terutama daerah yang padat penduduknya dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Pemerintah Kabupaten Agam memandang kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multi sektor yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, sehingga Pemerintah berupaya memecahkan persoalan kemiskinan dengan berbagai program.

Tingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Dengan perkataan lain, diperlukan kebijakan yang spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program atau kebijakan yang berpihak pada si miskin. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara makro masih belum tepat sasaran dan jumlah, masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro

⁹Tibyan, *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen* . Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

dan memposisikan masyarakat sebagai obyek sehingga masyarakat tidak terlibat dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

Dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Agam menghadapi persoalan yang cukup kompleks berkenaan dengan kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penduduk miskin Kabupaten Agam sepuluh tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2015 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan tahap kedua (lanjutan RPJMD 2005 – 2010) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam Tahun 2005 – 2025. Pada tahap kedua ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap permasalahan yang belum terselesaikan dan mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan visi jangka panjang daerah.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin berdampak pada turunnya jumlah penduduk miskin. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin selalu mengalami penurunan, pada Tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 44.900 jiwa atau 9,85 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Agam, sedangkan pada akhir Tahun 2015 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 32.295 atau 6,82 persen dari jumlah penduduk.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2005 – 2015

Nomor	Tahun	Jumlah	Presentase
1	2005	56.000	13,36
2	2006	59.400	13,93
3	2007	51.100	12,59
4	2008	45.300	11,20
5	2009	39.680	9,86
6	2010	44.900	9,85
7	2011	43.280	9,39
8	2012	38.443	8,44
9	2013	35.535	7,68
10	2014	33.204	7,02
11	2015	32.523	6,82

Sumber : Agam Dalam Angka, Tahun 2015

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial penduduk di Kabupaten Agam merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat bahwa tiap tahunnya angka kemiskinan dapat berkurang.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah adanya dua masa pemerintahan yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan yaitu masa pemerintahan Aristo Munandar dan masa pemerintahan Indra Catri.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar basic needs approach. Pendekatan ini memandang kemiskinan suatu ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menetapkan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah

untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

B. Rumusan Masalah

Pemerintahan Kabupaten Agam menjadi salah satu kabupaten yang mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam penelitian ini peneliti fokus bagaimana strategi dalam menanggulangi kemiskinan daerah Kabupaten Agam.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan. Keseluruhan Program Penanggulangan Kemiskinan yang telah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yakni Struktur Organisasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), Sumber Daya, Komunikasi dan Disposisi. Struktur organisasi TKPK. Komitmen Pimpinan dalam menunjang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten Agam. Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Program Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Aristo Munandar	Indra Catri
Penangan rumah tangga miskin	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> - TKPK - PKBM (Penanggulagn Kemiskinan berbasis Mesjid) - BMT - Program Perlindungan Sosial - Program Unggulan Agam Makmur 	<ul style="list-style-type: none"> - TNP2K - PKBM - BMT - Program Perlindungan Sosial - Program Unggulan Agam Menyemai

Memperhatikan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti perbandingan strategi kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan di dua periode dengan kepemimpinan yang berbeda. Lokasi penelitian di Kecamatan Lubuk Basang, karena Lubuk Basang sebagai pusat rentang kendali pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui **Bagaimana Perbandingan Strategi Kebijakan Aristo Munandar dan Indra Catri mengurangi angka kemiskinan pada periode 2005-2010 dan 2010-2015 di Kabupaten Agam ?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan strategi penanggulangan kemiskinan mengenai perbandingan Aristo Munandar dan Indra Catri dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Analisis perbandingan program dalam mengurangi angka kemiskinan mengenai perbandingan Aristo Munandar dan Indra Catri dalam penanggulangan kemiskinan.

D. Signifikansi Penelitian

Beberapa manfaat penelitian adalah :

1. Dari segi akademis

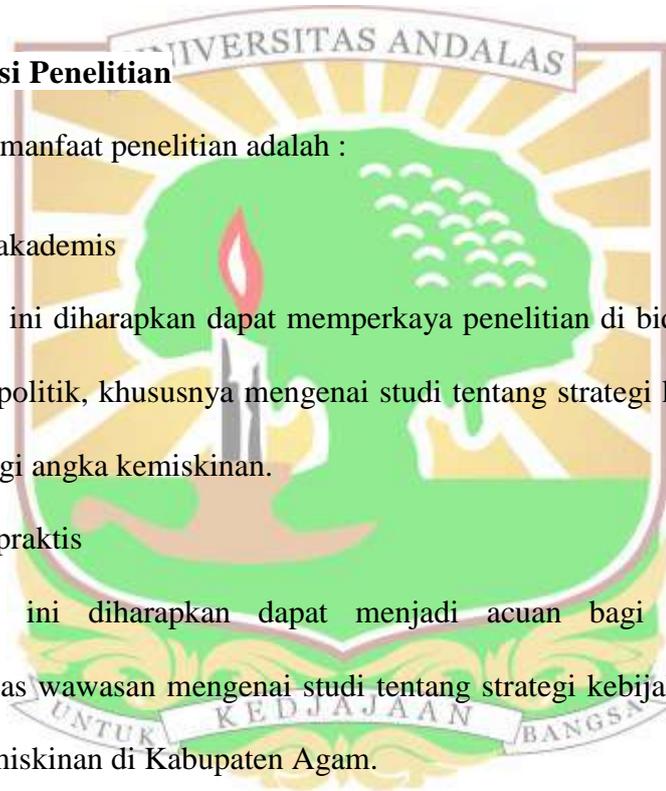
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya mengenai studi tentang strategi kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan.

2. Dari segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai studi tentang strategi kebijakan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Agam.

3. Dari segi sosial

Sebagai referensi bagi penelitian lain yang mendalami permasalahan tentang perbandingan strategi kebijakan dalam mengurangi angka kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Yuma Yunita, (2014)¹⁰ yang berjudul *Evaluasi Keberhasilan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) dan Manfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (Rts-Pm) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan manfaat program Raskin, serta menganalisis hubungan antara keberhasilan dan manfaat program Raskin tersebut di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, dengan menggunakan metode survey pada 69 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program Raskin di daerah penelitian berada pada persentase 42,51% dengan kategori “cukup berhasil”, karena masih adanya ketidaktepatan pelaksanaan pada beberapa indikator keberhasilan. Sedangkan, untuk tingkat manfaat program Raskin berada pada persentase 21,39% dengan kategori “kurang bermanfaat”, karena tingginya rata-rata pengeluaran /kapita/ bulan sebelum menerima Raskin yaitu Rp. 65.425/ bulan dibandingkan dengan rata-rata pengurangan beban pengeluaran/ kapita/ bulan setelah menerima Raskin yaitu Rp. 13.933/bulan.

¹⁰Yuma Yunita, *Evaluasi Keberhasilan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) dan Manfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (Rts-Pm) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara* di Pesisir Selatan. Jurusan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas di akses November 2016

Hal lain yang mempengaruhi tingkat manfaat program Raskin adalah tingginya jumlah konsumsi beras rumah tangga yaitu 42 kg/bulan dibandingkan dengan jumlah bantuan Raskin yang diperoleh yaitu 11,56 kg/RTS/bulan. Selanjutnya, hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa $\chi^2= 2,931$ (terima H), artinya tidak terdapat hubungan antara variabel keberhasilan dengan variabel manfaat program Raskin dan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,0238, artinya kekuatan hubungan antara kedua variabel sangat rendah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ines Ayu Fandari Putri (2015)¹¹ yang berjudul, *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.*

Penelitian ini tentang pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah dana pinjaman bergulir yang diberikan meningkatkan usaha, jumlah produk, dan kelancaran usaha yang akhirnya dapat menurunkan kemiskinan. Namun, data warga miskin di Kelurahan Siwalan tahun 2011-2013 jumlah warga miskinnya malah naik sehingga perlu diteliti kembali apakah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP) mempunyai pengaruh pada variabel-variabel penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat

¹¹Ines Ayu Fandari Putri, *Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang*(Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang di akses November 2016

dengan menggunakan data statistik. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Subjek yang akan diteliti adalah Masyarakat yang mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pinjaman bergulir yang diberikan pada Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari telah tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan : a) Terjadi peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Sebelum adanya pinjaman bergulir peningkatan jumlah produksi usaha lebih kecil namun sesudah adanya pinjaman dana bergulir peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM menjadi meningkat.

Hal ini berarti peningkatan jumlah produksi usaha anggota KSM lebih besar setelah mendapatkan pinjaman dana bergulir dibandingkan dengan sebelum adanya pinjaman dana bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah produksi yang semakin meningkat dan kelancaran usaha yang sangat disukai oleh anggota KSM.

b) Terdapat peningkatan usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir. Terdapat perbedaan yang cukup besar peningkatan usaha sebelum dan sesudah adanya pinjaman bergulir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan usaha dan kelancaran usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir. c) Terdapat kelancaran usaha anggota KSM sebelum dan sesudah program pinjaman bergulir.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nur Acla Chalia (2015)¹² yang berjudul Peran Bkm dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini Permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara sedang berkembang salah satunya adalah masalah kemiskinan dan upaya untuk menanggulangnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian melalui pemberdayaan. Pemberdayaan di sini ialah meningkatkan skill masyarakat miskin dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Diantaranya yaitu pelatihan komputer, menjahit, jamur merang, dll. Serta memberikan modal pinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. (2) Peran BKM dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Pecangaan Wetan meliputi tiga bidang (Tridaya) yaitu bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Bidang lingkungan seperti pembuatan saluran air, betonisasi, pavingisasi dll

Meskipun penelitian di atas sama-sama meneliti tentang penanggulangan kemiskinan akan tetapi peneliti lebih tertarik meneliti tentang perbandingan strategi kebijakan Bupati Agam Aristo Munandar dan Bupati Indra Catri karena di bawah kepemimpinannya telah berhasil mengurangi angka kemiskinan.

¹²Nur Acla Chalia, *Peran Bkm dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, di akses November 2015

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Teori dan Konsep	Metode Penelitian	Informan
1	Yuma Yunita (2014) yang berjudul Evaluasi Keberhasilan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) dan Manfaatnya Bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (Rts-Pm) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Konsep Kemiskinan dan Kebutuhan Dasar	Deskriptif Survei Kuantitatif	Survei Masyarakat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
2	Ines Ayu Fandari Putri (2015) yang berjudul, Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang	Teori Lingkaran Kemiskinan Kuncoro	deskriptif kuantitatif	Pemda Kecamatan Warga Sukarame
3	Nur Acla Chalia (2015) yang berjudul Peran Bkm dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara	Kemiskinan dan Kemandirian dalam pemberdayaan	Kualitatif Deskriptif	Pemda Kecamatan Pecangaan
4	Luthfi Affandi (2016) yang berjudul Perbandingan Strategi Kebijakan Aristo Munandar dan Indra Catri di Kabupaten Agam	Perbandingan Kebijakan Publik Heidendeimer	Kualitatif Studi Kasus Deskriptif	Pemda Kecamatan Lubuk Basung

B. Kerangka Teoritis

1. Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut William N. Dunn yang mengatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat.¹³

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus

¹³Opcit hal 24-25

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.¹⁴

3. Pengertian Comparative Public Policy

Sebagaimana dikemukakan oleh Feldman perbandingan kebijakan publik adalah suatu metode mempelajari kebijakan publik (meliputi proses kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan) yang dilakukan dengan mengadopsi pendekatan “comparative”. Yaitu membandingkan kebijakan tertentu dengan kebijakan yang lain yang ada di negara tertentu dengan yang ada di negara yang lain. Heidenheimer, memberi penegasan yang lebih khusus, dengan menyatakan bahwa perbandingan kebijakan publik adalah studi tentang bagaimana, mengapa, dan dampak apa yang ditimbulkan dari adanya tindakan pemerintah dan tidak bertindaknya pemerintah.¹⁵

¹⁴Ibid.,

¹⁵ Bambang Utoyo , *Kajian Perbandingan Kebijakan Pemerintahan Lokal dan Strategi Partisipasi Publik*. Vol 3, No. 7, Juli- Desember 2009 di akses Februari 2017

Paling sedikit ada 3 alasan dan tujuan mengapa kita perlu melakukan studi perbandingan kebijakan public yang ada di antara negara tertentu dengan negara lain, atau antara kebijakan yang ada di negara kita dengan kebijakan yang ada di negara-negara lain. Yaitu:

- a. Untuk memperoleh gambaran dan pelajaran bagaimana mendisain kebijakan yang baik.
- b. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lebih baik tentang bagaimana peran kelembagaan-kelembagaan pemerintah dan proses politik (sebagaimana peran yang seharusnya) terutama berkaitan dengan perumusan dan pemecahan masalah-masalah konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Untuk mengkaji berbagai kebijakan yang ada secara lintas nasional.

Feldman mengkonsentrasikan pada 2 tipe pilihan dari sekian banyak pilihan dalam kerangka kerja politik. Yaitu:

- a. Pilihan-pilihan wilayah cakupan (Choices of Scope). Tipe Choices of Scope (pilihan wilayah cakupan) ini menganalisis sejauhmana peran dan tanggung jawab public (pemerintah) dibandingkan dengan peran dan tanggung jawab privat (swasta) dalam menangani masalah kebijakan. Dengan kata lain, sejauhmana wilayah cakupan keterlibatan pemerintah dalam menangani permasalahan public dibandingkan dengan wilayah cakupan keterlibatan masyarakat (privat).

Tipe Choices of Scope ini juga digunakan untuk menganalisis apakah suatu kebijakan itu ditetapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah

tunggal atau masalah yang kompleks (saling berkaitan). Misalnya kebijakan tentang pendidikan; apakah kebijakan itu hanya khusus untuk menyelesaikan masalah pendidikan saja atau juga dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan lain-lain yang berkaitan dengan peningkatan akses warganegara untuk memperoleh kehidupan yang lebih harmonis.

- b. Pilihan-pilihan Instrumen Kebijakan (Choices of Policy Instruments). Tipe pilihan ini menganalisis instrument atau alat kebijakan apa yang digunakan. Menggunakan struktur pemerintahan sebagai instrument kebijakan atau alat-alat lainnya. Kebijakan itu diambil untuk tujuan (dijadikan alat mencapai tujuan) mempertahankan kekuasaan pengambilan keputusan di tingkat nasional atau untuk tujuan (dijadikan alat mencapai tujuan) delegasi wewenang di tingkat yang lebih rendah. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan instrument kebijakan yang digunakan yang umumnya berhubungan dengan instrument tertentu dalam intervensi public.

4. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum. Baik untuk makan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara per orang 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Seseorang dikategorikan miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 211.726 atau sekitar Rp 7.000 per hari.¹⁶

Sementara itu 2 macam ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.¹⁷

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan pendapatan dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimumnya, maka dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.
- b. Kemiskinan relatif, dimana tingkat kemiskinan lebih ditujukan pada perbandingan tingkat kehidupan satu wilayah dengan wilayah lain. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

¹⁶Agam dalam Angka 2015, 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, hal 233

¹⁷Tibyan, *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen* . Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Oleh karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (a) secara sosial ekonomi menjadi beban masyarakat, (b) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (c) rendahnya partisipasi masyarakat, (d) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (e) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (f) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia semakin pentingnya maka melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 124 Tahun 2001 juncto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).¹⁸

Selanjutnya Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 15 Tahun 2010 tentang TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan

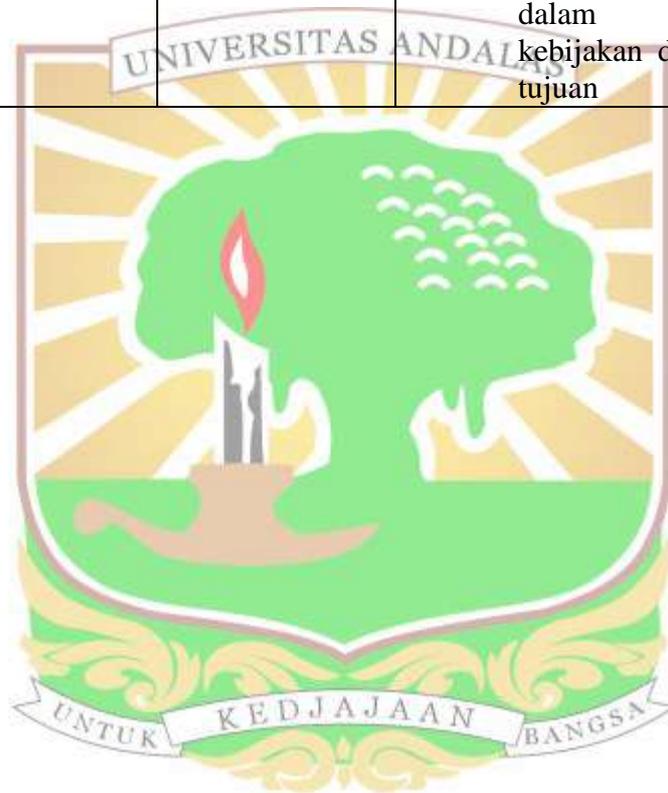
¹⁸Ibid.

program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

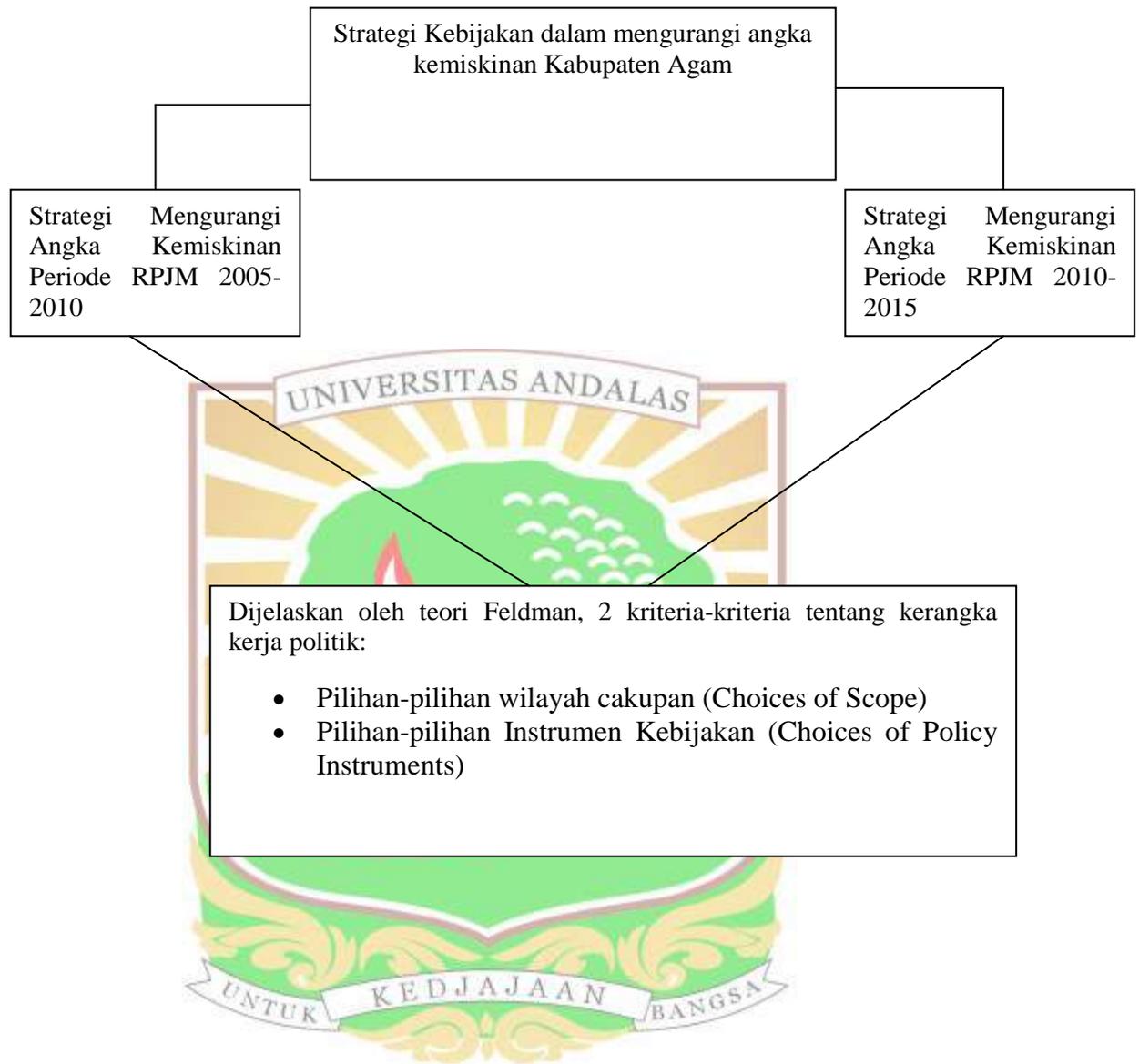
Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Konsep	Sub konsep	Indikator
Kebijakan Publik	Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.
	Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
	Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau

		keputusan peradilan.
	Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia
	Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemeritnahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan



C. Skema Penelitian



Kebijakan adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tentang Penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan. Strategi kebijakan periode 2010-2015 merupakan tindak lanjut dari kebijakan periode 2005-2010. Pada tahap ini, perlu adanya upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar dalam penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan tersebut bisa sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hasil dari kebijakan yang baik akan menghasilkan sebuah sistem dalam mengurangi angka kemiskinan yang sesuai dengan harapan. Selain itu, kebijakan tersebut bagaimana arah kebijakan umum dan strategi kebijakannya, sehingga hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam mengurangi angka kemiskinan.

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui strategi kebijakan oleh periode 2005-2010 dan periode 2010-2015 menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Agam.

Jadi penelitian ini ingin melihat bagaimana perbandingan strategi kebijakan mengurangi angka kemiskinan pada periode 2005-2010 dan 2010-2015, sehingga terlihat perbandingan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Feldman sebagai alat analisis, dimana menurut Feldman terdapat 2 (dua) kriteria untuk melihat strategi kerangka kebijakan tentang cakupan wilayah kebijakan dan instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan cukup untuk menjelaskan perbandingan penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian komparatif tipe studi kasus dan pendekatan kualitatif. Penelitian komparatif berfokus pada persamaan dan perbedaan antar unit. Orientasi komparatif meningkatkan pengukuran dan konseptualisasi. Konsep yang ada dikembangkan untuk mempelajari unit atau latar sosial cenderung tidak hanya berlaku bagi kebudayaan atau latar belakang tertentu. Kekuatan komparatif adalah kemampuannya untuk menyingkirkan atau menawarkan penjelasan alternatif untuk hubungan kausal.¹⁹

Robert K Yin menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan nyata. Penjelasan ini menjadi landasan bahwa studi kasus memiliki karakteristik penelitian kualitatif dimana adanya latar alamiah. Robert K. Yin²⁰ mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.

Studi kasus, seperti yang dirumuskan Robert K. Yin²¹, merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur how dan why pada pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masalah-masalah kontemporer (masa

¹⁹ W. Lawrence Neuman. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks. Hlm. 535

²⁰ Yin, K, Robert. *Studi Kasus : Desain dan Metode*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000 hal 18

²¹ *Ibid.*,

kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peritiswa (kasus) yang ditelitinya.

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dapat memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali suatu proses generalisasi. Peneliti bermaksud menunjukkan adanya sesuatu yang dapat dipelajari dari kasus yang akan diteliti yaitu bagaimana perbandingan strategi kebijakan Bupati Aristo Munandar dan Bupati Indra Catri dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Agam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Lubuk Basung kantor Bupati Agam. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Lubuk Basung sebagai pusat pemerintahan dan masyarakat di sekitar dapat merasakan dampak langsung sebagai rentang kendali.

C. Peran Peneliti

Peranan peneliti dalam penelitian ini merupakan sebuah *instrumen* utama yang berperan sebagai pengumpul data dan melakukan interpretasi data²². Peneliti juga berfungsi untuk menetapkan fokus peneliti, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Sedangkan alat-alat yang lain seperti panduan wawancara, kaset rekaman, dan lainnya hanyalah sebagai alat bantu pengganti peneliti itu sendiri sebagai pengkonstruksi realitas atas dasar pengalaman di medan penelitian.

Dalam penelitian studi kasus, menurut Robert K. Yin, seorang peneliti dituntut memiliki beberapa pokok-pokok keterampilan sebagai berikut²³:

1. Seseorang harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik – dan menginterpretasikan jawaban-jawabannya.
2. Seseorang harus menjadi “pendengar” yang baik dan tak terperangkap oleh ideologi atau prakonsepsinya sendiri.
3. Seseorang hendaknya mampu menyesuaikan diri dan fleksibel, agar situasi yang baru dialami dapat dipandang sebagai peluang, dan bukan ancaman.
4. Seseorang harus memiliki daya tangkap yang kuat terhadap isu-isu yang akan diteliti, apakah hal ini berupa orientasi teoritis atau kebijakan, ataupun bahkan berbentuk eksploratoris. Daya tangkap seperti itu mengurangi peristiwa-peristiwa yang relevan dan informasi yang harus dipilih ke arah proporsi yang bisa dikelola.
5. Seseorang harus tidak bias oleh anggapan-anggapan yang sudah ada sebelumnya; termasuk anggapan-anggapan yang diturunkan dari teori. Karena itu, seseorang harus peka dan responsif terhadap bukti-bukti yang kontradiktif.

Terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 peneliti mendapatkan izin dari pembimbing I dan II untuk dapat melakukan penelitian dan pengumpulan data di lokasi penelitian yang menjadi objek peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan pengurusan surat izin turun lapangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

²² Lexy. J Moleong. *Op.cit.*, hlm. 4

²³ *Ibid.* Hlm. 70

pada tanggal 10 Desember 2016. Pada tanggal 21 Desember peneliti mengurus surat izin rekomendasi penelitian di Badan Pelayanan Kabupaten Agam.

Pada penelitian ini, peneliti memiliki peran sebagai *instrument* penelitian, yang mana peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Pada tanggal 21 Desember 2016 peneliti mencoba menghubungi Zulfi Ernawati selaku informan kunci dalam penelitian ini, Alhamdulillah peneliti bisa menemui beliau. Pada tanggal 23 Desember 2016 peneliti menemui Gampo Alam untuk diwawancara di kantor Bappeda. Selanjutnya, pada tanggal sama peneliti menemui Diah Evihabsari di Kantor Bappeda.

Pada tanggal 29 Desember 2016 peneliti menemui Rinati selaku Kepala Bidang Jaminan dan Kesehatan. Pada tanggal 3 Februari 2017 peneliti menemui Syafirman selaku Sekretaris Kabupaten Agam sebagai informan triangulasi. Pada tanggal 4 Februari 2017 peneliti menemui Aristo Munandar di kediamannya selaku Bupati Agam sebagai informan kunci. Pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 09.45 WIB peneliti menemui Isman Imran di kantor Bupati selaku informan triangulasi. Beliau di kediamannya di Ibu Kota Payakumbuh untuk melakukan wawancara.

Pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 13.00 peneliti menemui Martias Wanto selaku Sekretaris Kabupaten Agam sebagai informan triangulasi. Pada tanggal 7 Februari 2017 peneliti menemui Welfizar selaku Kepala Bappeda Kabupaten Agam sebagai informan triangulasi. Pada tanggal 8 Februari 2017

peneliti menemui Indra Catri selaku salah satu informan kunci di Rumah Dinas Kabupaten Agam.

Selama melakukan penelitian ini dan pengumpulan data, peneliti merasa tidaklah mudah melakukan sebuah penelitian agar skripsi ini menjadi sebuah karya ilmiah yang layak dibaca dan khususnya dapat menjadi sumbangan dalam segi akademis. Banyaknya hambatan-hambatan yang ditemui seperti kesulitan untuk menemui informan penelitian karena berbagai alasan. Peneliti menghabiskan waktu selama kurang lebih 2 bulan untuk melakukan pengumpulan data guna terus memperkaya penelitian ini dengan informasi-informasi yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini sangat dibutuhkan tenaga yang besar, waktu dan biaya yang tidaklah sedikit.

D. Unit Analisis

Menurut Hamidi, unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria informan tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitian.²⁴

Dalam penelitian sosial unit analisis dapat berupa lembaga, keluarga dan organisasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan lembaga pemerintahan Kabupaten Agam.

²⁴Mardalis. *Metode Sosial Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 39

E. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik-teknik tertentu yang bertujuan untuk menyaring sebanyak mungkin informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan dibangun. Dalam pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar diperoleh data yang tepat dari orang yang tepat pula.²⁵

Tabel 3.1
Nama Informan utama dalam penelitian periode 2005-2010

No	Nama	Jabatan
1	Aristo Munandar	Bupati Agam
2	Zulfi Ernawati	Kabid Yanres Kesos
3	H. Dt. Gampo Alam	Inspektorat Kabupaten Agam
4	Rospiyarni Rosa, ST. M. Eng	Kasubid Sumber Daya Manusia

Tabel 3.2
Nama Informan utama dalam penelitian periode 2010-2015

No	Nama	Jabatan
1	Indra Catri	Bupati Agam
2	Diah Evihabsari	Kasubid Sosial
3	Rianti	Kepala Bidang Jaminan dan Kesehatan
4	Sari Mustika	Kasubid Pertanian Kehutanan dan Kelautan

²⁵*Ibid.* 2006. Hlm 136

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sedangkan data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.²⁶ Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Ada dua jenis teknik wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Nasution, yaitu wawancara tak berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tak berstruktur ialah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sedangkan, wawancara berstruktur merupakan wawancara dengan sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara lebih berstruktur berdasarkan apa yang telah didapatkan dari responden yang dilakukan setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan.²⁷ Sedangkan menurut Moleong, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.²⁸

Data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan strategi

²⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. Hlm. 171-172.

²⁷ Andi Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Diva Press. Hlm. 152-155.

²⁸ Lexi J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 190.

penanggulangan kemiskinan serta RPJM 2005-2010 dan 2010-2015 Kabupaten Agam.

G. Uji Pembuktian (Triangulasi) Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi agar validitas dan realibilitas terhadap data yang diperoleh tercapai. Uji pembuktian atau triangulasi sendiri adalah teknik pemeriksaan keabsahan informasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar informasi itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, artinya memilih berbagai sumber yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan teknik ini dimungkinkan akan memperoleh variasi informasi menyeluruh.

Menurut Susan Stainback tujuan dari triangulasi adalah bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang diteliti.²⁹

Menurut Manthinson, nilai dari teknik pengumpulan data triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil triangulasi sumber yang mengetahui tentang strategi penanggulangan kemiskinan.

Tabel 3.3

Nama Triangulasi dalam penelitian periode 2005-2010		
No	Nama	Jabatan

²⁹ Muhammad, Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga. 2010. Hlm.59

³⁰*Ibid.* Hlm. 60

1	H. Syafirman	Sekda
2	Ir. Isman Imran	Kepala Bappeda

Tabel 3.4

Nama Triangulasi dalam penelitian periode 2010-2015

No	Nama	Jabatan
1	Martias Wanto	Sekda
2	Drs. Welfizar, Msi	Kepala Bappeda

H. Teknik Analisis Data

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Taylor adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹

Seluruh data yang didapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi etik merupakan pandangan dari peneliti, dan informasi emik merupakan pandangan dari informan.³² Hasil wawancara kemudian dipaparkan sebagaimana yang dikatakan oleh informan kemudian dibahas, diinterpretasi, atau dianalisa oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data deskriptif yang peneliti pilih adalah komparasi. Di mana peneliti membandingkan strategi kebijakan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Agam.

³¹ Lexi J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya. Hlm. 248.

³² Simon Saban Ola. *Pendekatan Dalam Penelitian*. FKIP Universitas Nusa Cendana.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan Karya Ilmiah ini terdiri dari 6 bab, yaitu :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini peneliti telah mendeskripsikan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, serta signifikansi penelitian mengenai strategi kebijakan Aristo Munandar dan Indra Catri dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Agam. Sehingga membandingkan strategi kebijakan yang digunakan kedua pemimpin tersebut dalam program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi tujuan penelitian ini.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II ini mendeskripsikan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta mendeskripsikan mengenai strategi kebijakan yang telah peneliti pakai untuk melihat strategi kebijakan yang digunakan Pemerintahan Kabupaten Agam. Tiga penelitian terdahulu dijelaskan dalam rancangan penelitian ini, yaitu pertama, penelitian Yuma Yunita penelitian dengan judul Evaluasi Keberhasilan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Program Raskin) dan Mamfaatnya bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Mamfaat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Kedua penelitian yang dilakukan Ines Ayu Fandari Putri dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan Program Pinjaman Bergulir di Kelurahan Siwalayan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dan ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nur Acla Chalia dengan judul Peran Bkm dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Pecangaan Kabupaten Jepara.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab ini mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang peneliti pakai untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode komparatif dengan pendekatan kualitatif.

4. BAB IV Deskripsi Wilayah

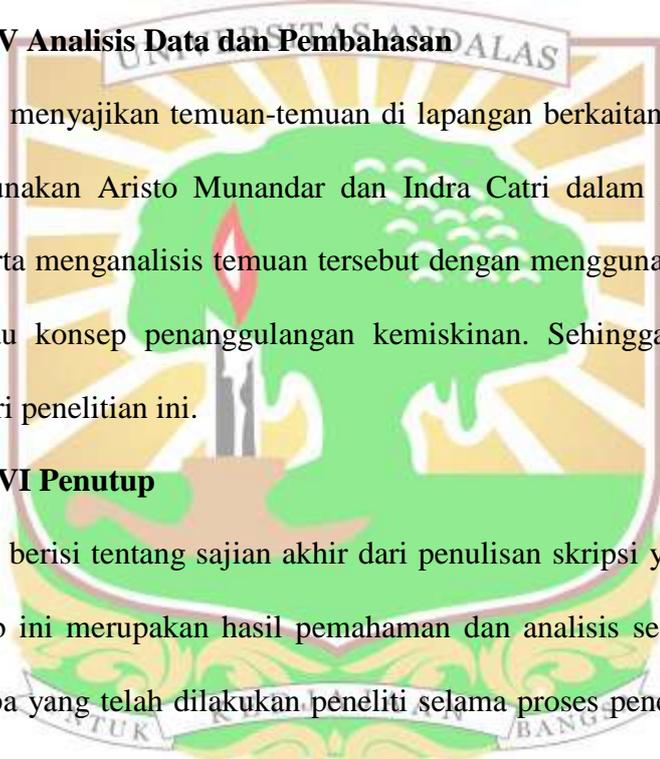
Berisikan tentang deskripsi lokasi dan objek penelitian. Bab ini merupakan gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Agam

5. BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan-temuan di lapangan berkaitan dengan strategi kebijakan digunakan Aristo Munandar dan Indra Catri dalam penanggulangan kemiskinan serta menganalisis temuan tersebut dengan menggunakan pandangan-pandangan atau konsep penanggulangan kemiskinan. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini.

6. BAB VI Penutup

Bab ini berisi tentang sajian akhir dari penulisan skripsi yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan hasil pemahaman dan analisis secara ilmiah atas keseluruhan apa yang telah dilakukan peneliti selama proses penelitian lapangan. Dalam bab ini juga akan memberikan kontribusi berupa saran, baik secara akademis maupun secara praktis.



BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis wilayah

Kabupaten Agam terletak antara 00 01'34"- 00 28'43" Lintang Selatan dan 99 46'39"-100 32'50" Bujur Timur, ketinggian dari permukaan laut 0-2.877 dari permukaan laut dengan luas wilayah 2.232,30 km atau (5,29%) dari luas wilayah Provinsi Sumatera yang memiliki luas 42.229,04 km, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara	: Kab. Pasaman dan Pasaman Barat
Timur	: Kabupaten Lima Puluh Kota
Selatan	: Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar
Barat	: Samudera Indonesia



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Agam

Berdasarkan data BPS dalam angka Tahun 2009, Kabupaten Agam memiliki kecamatan dan 82 Nagari. Disamping itu Kabupaten Agam juga

mempunyai sebuah danau yaitu Danau Maninjau yang mempunyai luas perairan + 9.950 Ha dengan kedalaman 175 m dari permukaan air rata-rata.

Kabupaten Agam juga memiliki wilayah pantai dengan panjang garis pantai +43 km dan memiliki 2 (dua) buah pulau yaitu pulau Tengah dan Pulau ujung dengan luas masing masing pulau seluas + 1 Km. Kabupaten Agam juga memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Merapi dengan ketinggian 2.891 m dpl dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 m dpl. Selain ina juga terdapat 3 aliran sungai yang cukup besar, yaitu Batang Antokan, Batang Masang dan Batang Agam.

B. Topografi

Kabupaten Agam mempunyai kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0- 2.891 meter dari permukaan laut.

Menurut kondisi fisiografinya, ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam. bervariasi antara 2 meter sampai 1.031 meter dpl, adapun pengelompokkan yang didasarkan atas ketinggian adalah sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-500 m dpl seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah barat yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya.
2. Wilayah dengan ketinggian 500-1000 m dpl seluas 43,49% berada pada wilayah Kecamatan Bato 725.1525 m dpl, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Malalak 425- 2075 m dpl, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palembayan 50- 1425 dpl, Kecamatan Palupuh 325-

1650 m dpl, Kecamatan Banuhampu 925-2750 m dpl dan Kecamatan Sungai Pua 625-1150 m dpl.

3. Wilayah dengan ketinggian > 1000 m dpl m seluas 11,96 % meliputi sebagian Kecamatan IV Koto 850- 2750 m dpl, Kecamatan Matur 825-1375 m dpl dan Kecamatan Canduang, Sungai Pua 1150-2625 m dpl.

Kawasan sebelah barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0 - 8%) mencapai luas 71.956 ha, sedangkan bagian tengah dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal (>45%) yang tercatat dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal (>45%) berada pada jajaran Bukit Barisan dengan puncak Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam

Berdasarkan kondisi topografi wilayah tersebut, Kabupaten Agam didominasi dari sektor pertanian, berdasarkan data PPLS Tahun 2011 terdapat 24.995 individu yang bergerak di bidang pertanian tanaman padi dan palawija dari 7,879 individu yang bergerak di bidang pertanian secara umum. Tabel 4.1 memperlihatkan persentase penduduk miskin berdasarkan jenis lapangan usaha.

Tabel 4.1

Penduduk Miskin Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Individu	%
Pertanian	37.879	68,5
Industri	2.961	5,3
Perdagangan	3.740	6,7
Jasa	3.606	6,5
Lainnya	6.075	12

Sumber Data : Basis Data Terpadu TNP2K Tahun 2011

Disamping itu terdapat wilayah yang memiliki topografi lereng pegunungan atau perbukitan, dimana terdapat indikasi bahwa salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah tersebut disebabkan oleh kurangnya lahan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Agam

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)	Jumlah	
				Nagari	Luas (km ²)
1	Tanjung Mutiara	205,73	9,22	3	205,73
2	Lubuk Basung	278,40	12,47	5	278,40
3	Ampek Nagari	268,69	12,04	4	268,69
4	Tanjung Raya	244,03	10,93	9	244,03
5	Matur	93,69	4,20	6	93,69
6	IV Koto	68,72	3,08	11	68,72
7	Malalak	104,49	4,68	-	104,49
8	Banuhampu	28,45	1,27	7	28,45
9	Sungai Puar	44,29	1,98	5	44,29
10	Ampek Angkek	30,66	1,37	7	30,66
11	Canduang	52,29	2,34	3	52,29
12	Baso	70,30	3,15	5	70,30
13	Tilatang Kamang	56,07	2,51	3	56,07
14	Kamang Magek	99,60	4,46	3	99,60
15	Palembayan	349,81	15,67	6	349,81
16	Palupuh	237,08	10,62	4	237,08
Jumlah		2232,30	100,00	81	2232,30

Sumber Data : Basis Data Terpadu TNP2K Tahun.

Berdasarkan tabel tersebut, kecamatan terluas yaitu Kecamatan Palembayan dengan luas 349,81 Km² atau 15.67% dari luas Kabupaten Agam secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah

Kecamatan Banuhampu dengan luas 28,45 Km² atau sekitar 1,27% dari luas Kabupaten Agam.

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Agam melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dituangkan secara lebih rinci ke dalam Misi 1 sampai dengan Misi 7 berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut :

1. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 1

Misi Meningkatkan kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bertujuan untuk memantapkan penerapan nilai – nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat, diwujudkan dengan mengoptimalkan fungsi mesjid, meningkatkan pendidikan keagamaan baik di sekolah formal maupun non formal, mendorong peran lembaga-lembaga keagamaan dan meningkatkan kesholehan sosial masyarakat.

Pembangunan dibidang adat dan budaya bertujuan untuk melestarikan dan menghidupkan nilai-nilai adat dan budaya yang sudah menjadi filosofi masyarakat Agam, diwujudkan dengan penguatan fungsi lembaga-lembaga adat di Nagari, melestarikan kesenian tradisional sebagai kekayaan budaya daerah dan daya tarik wisatawan.

2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 2

Misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean governance) dan profesional bertujuan untuk penguatan tata kelola pemerintahan

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan daerah dan aset.

3. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 3

Misi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkarakter bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, mutu pendidikan, derajat kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan daya saing pemuda dan olah raga.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu pembangunan kesehatan, pendidikan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Ketiga unsur ini saling bersinergi untuk memperkuat pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah telah membangun komitmen bahwa : Tidak ada orang sakit yang tidak berobat, tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan dengan kata lain “pendidikan yang berkualitas”. Hal ini dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk sarana sanitasi sekolah beserta air bersihnya. Kemudian peningkatan sumber daya pendidik, peningkatan mutu dan kurikulum.

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau, dengan melengkapi sarana prasarana pelayanan kesehatan sampai pada tingkat Nagari dan jorong, menyediakan petugas kesehatan

terutama bidang sampai di tingkat jorong dan selanjutnya peningkatan kualitas dan kapabilitas petugas kesehatan. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tidaklah terlepas dari upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan dengan kebijakan pengendalian angka kelahiran melalui peningkatan akses pelayanan KB dan peningkatan KIE.

4. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 4

Misi Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang diliat dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan potensi daerah bahwa Kabupaten Agam adalah daerah Agraris maka aspek peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah lapangan usaha pertanian dengan sub-sub lapangan usahanya menjadi fokus pengembangan ekonomi. Disamping itu pengembangan usaha mikro, industri kecil dan menengah terutama yang bergerak dalam pengeolahan hasil pertanian diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah produk yang didukung dengan peranan koperasi dan lembaga-lembaga keuangan masyarakat. Selanjutnya pengembangan industri ini diharapkan juga mampu mendukung berkembangnya industri pariwisata dan jasa-jasa lainnya.

Sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam membentuk PDRB mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Selama kurun waktu 2010 – 2015 kontribusi sektor pertanian masih mendominasi struktur PDRB, karena itu peningkatan nilai tambah sektor pertanian akan

memberi dampak yang nyata terhadap total nilai PDRB dan produktivitas daerah. Disamping peningkatan kontribusi terhadap PDRB pembangunan lapangan usaha pertanian diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, serta untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk serta menyerap tenaga kerja. Dari segi penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2015 lapangan usaha pertanian menyerap lebih 42 persen penduduk yang bekerja.

Hampir semua sub lapangan usaha pertanian berpeluang besar untuk dikembangkan seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Intensifikasi, ekstensifikasi dan optimalisasi penggunaan lahan pekarangan, lahan tidur serta pengaturan alih fungsi lahan merupakan langkah-langkah yang perlu terus ditingkatkan dan didukung dengan peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur.

1. Perdagangan dan Pasar

Sub lapangan usaha perdagangan dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importer ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga lainnya yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas. Kontribusi lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran terhadap

PDRB Kabupaten Agam Tahun 2015 menurut harga berlaku sebesar 14,99 persen didominasi oleh sub lapangan usaha perdagangan eceran yaitu sebesar 14,22 persen.

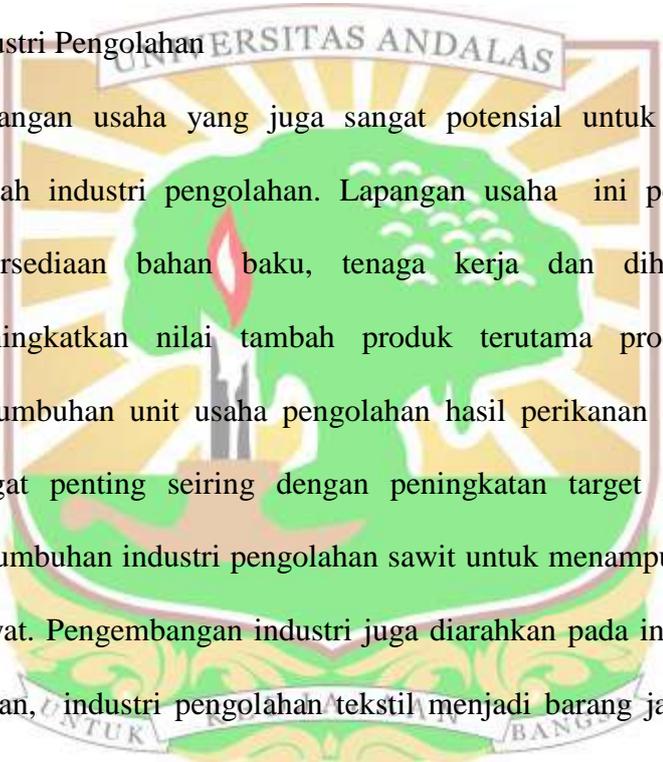
Pengembangan perdagangan sangat penting dan diarahkan untuk mendukung kelangsungan produksi, diantaranya peningkatan nilai ekspor produk-produk perkebunan seperti caciavera, pinang, kakao dan produk pertanian lainnya dan perikanan serta produk-produk industri rumah tangga dan kerajinan. Dukungan tersebut berupa fasilitasi akses pemasaran produk ke luar negeri maupun dalam negeri, promosi, pengawasan peredaran barang, informasi harga dan perlindungan konsumen.

Untuk meningkatkan daya saing produk di pasar regional maupun internasional diperlukan peningkatan dan pengawasan kualitas seperti kadar air, bebas dari mikroorganisme, standar gizi, keamanan dari bahan-bahan kimia berbahaya, kebersihan dan diiringi dengan pengepakan/kemasan yang baik dan menarik dengan informasi produk yang lengkap serta sertifikasi halal.

Pasar merupakan infrastruktur perdagangan yang sangat penting. Pada umumnya pasar-pasar tersebut masih tradisional. Peranan lembaga pengelola pasar sangat mempengaruhi perkembangan pasar. Sampai tahun 2015 baru 75 persen pasar sudah mempunyai Badan Pengelola Pasar. Pembinaan terhadap pengelola/pengurus pasar perlu ditingkatkan diantaranya bagaimana manajemen pasar dengan baik seperti penataan tempat berdagangan, aspek kebersihan, kesehatan dan kehalalan barang

dagangan, keamanan dan kenyamanan, pemeliharaan pasar, pengelolaan sampah, parkir, pemungutan retribusi, pengelolaan keuangan pasar dan lain sebagainya. Namun terhadap pembangunan sarana fisik pasar intervensi Pemerintah Daerah pada umumnya terkendala oleh kepemilikan asset. Mendorong partisipasi pihak ke tiga untuk membangun pasar merupakan salah satu strategi yang perlu ditingkatkan serta memanfaatkan sumber-sumber dana lainnya.

2. Industri Pengolahan



Lapangan usaha yang juga sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri pengolahan. Lapangan usaha ini potensial karena ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk terutama produk pertanian. Penumbuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan sangat penting seiring dengan peningkatan target produksi, serta penumbuhan industri pengolahan sawit untuk menampung hasil kebun rakyat. Pengembangan industri juga diarahkan pada industri makanan ringan, industri pengolahan tekstil menjadi barang jadi dan industri pengolahan pakan ikan yang ramah lingkungan. Walaupun di Kabupaten Agam industri pengolahan masih di dominasi oleh industri kecil dan rumah tangga tetapi industri ini terbukti lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Perhatian dan dorongan dari pemerintah daerah sangat penting terutama untuk aspek promosi, peningkatan kemampuan manajerial dan kerwira usahaan serta fasilitasi permodalan. Kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk

menggunakan produksi sendiri sangat baik untuk membantu peningkatan produksi dan sekaligus media promosi. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini di Tahun 2015 sebesar 12,36.perdari total jumlah penduduk yang bekerja diharapkan meningkat menjadi 20 persen di Tahun 2021.

3. Perkebunan

Lapangan usaha perkebunan di Kabupaten Agam potensinya cukup besar karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai. Komoditi tanaman yang dominan dan prospektif untuk dikembangkan diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa dalam, tebu, kakao, kopi, cengkeh dan kulit manis . Pembudidayaan komoditi perkebunan selain diusahakan oleh masyarakat, juga dikelola oleh perusahaan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) yaitu untuk kelapa sawit dan kakao.

Sebaran lokasi rencana peruntukan kawasan perkebunan yaitu : Karet di Kecamatan Ampek Nagari, Palembayan; Kelapa dalam di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Lubuk Basung; Cengkeh di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak; kayu manis di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak; Pala di Kecamatan Tanjung Raya; Gambir di Kecamatan Palupuh; Kakao tersebar di seluruh Kabupaten Agam.

4. Perikanan

Pengembangan perikanan terutama perikanan budidaya baik di laut maupun di darat sangat berpeluang karena Kabupaten Agam telah

ditetapkan sebagai kawasan sentra produksi perikanan untuk Propinsi Sumatera Barat. Disamping mengoptimalkan pengelolaan kawasan Minapolitan target produksi perikanan akan dicapai dengan pemanfaatan kolam-kolam rakyat yang selama ini dibiarkan terlantar, air payau, daerah aliran sungai dan perairan umum lainnya yang berpeluang hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam terutama kecamatan Tanjung Raya. Sistem Mina Padi dikembangkan dalam rangka mendukung program Nasional ; Mina Padi Satu Juta Hektar diarahkan ke kecamatan Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palupuah, Baso, Lubuk Basung dan Palembayan, dan sistem Mina Kebun Rakyat diarahkan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Palembayan. Perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Mutiara. Rencana pengembangan perikanan budidaya meliputi ;

- a. Pusat Kawasan Minapolitan terdapat di kawasan Maninjau
- b. Sentra pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR) Majalaya, Nilem dan pengembangan budidaya minapadi di Kecamatan Ampek Angkek.
- c. Sentra budidaya ikan patin dan pengolahan lele di Kecamatan Tanjung Raya, Palembayan
- d. Sentra pengembangan nila, mas dan lele serta pengembangan UPR di Kecamatan Lubuk Basung

Pencapaian sasaran dan target-target pembangunan pertanian dan perikanan akan sangat ditentukan oleh peranan Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Oleh karena itu pemberdayaan penyuluh baik dari segi

sumber daya manusianya maupun dukungan operasionalnya menjadi sangat penting. Disamping itu perberdayaan kelompok tani serta lembaga-lembaga lainnya seperti P3A, HKTI, Taruna Tani dan lain-lain juga perlu ditingkatkan.

5. Koperasi dan Keuangan Masyarakat

Koperasi adalah badan usaha dan organisasi yang modern yang dikendalikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berbagai ketentuan pemerintah tunduk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengelolaan koperasi yang mengikuti kaidah-kaidah tersebut akan menjadikan koperasi yang sehat dan kompetitif di tengah beragamnya badan usaha. Di tengah kehidupan masyarakat koperasi berfungsi sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan bidang koperasi diarahkan agar koperasi dapat berperan dalam berbagai program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan kebutuhan masyarakat local dan alat pengendalian harga untuk stabilisasi dan dinamisasi perekonomian. Pengembangan koperasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan terhadap pengurus.

Selanjutnya peranan perbankan dan Lembaga Keuangan Masyarakat perlu terus dibina dan didorong agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Ke depan diharapkan semua koperasi dan lembaga-lembaga keuangan masyarakat sudah berbadan hukum.

6. Ketahanan Pangan

Kabupaten Agam dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,93 persen per tahun, diprediksi mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 478.833 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap bahan pangan termasuk beras. Akan tetapi, peningkatan jumlah penduduk ini tidak diiringi dengan peningkatan laju pertumbuhan produksi beras sebagai bahan pangan utama masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi daerah untuk memacu pertumbuhan produksi beras atau mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat untuk tidak tergantung hanya pada konsumsi beras.

Pencapaian sasaran pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan dilaksanakan dengan 11 (sebelas) agenda yaitu 1) Agam Menyemai, 2) Sempurnakan pola konsumsi masyarakat, 3) Pemberdayaan rumah tangga petani melalui panca daya, 4) Diseminasi dan sosialisasi, 5) Memperkuat kelembagaan pembina petani, 6) Rasionalisasi target produksi, 7) Revitalisasi penyuluh, 8) Memperkuat aksesibilitas dan stabilisasi harga, 9) Mengamankan dan menjaga mutu pangan masyarakat, 10) Tingkatkan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, 11) Perkaya program kegiatan Nasional dan Regional.

5. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 5

Misi Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis nagari dengan mengoptimalkan peran nagari dalam memanfaatkan peluang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Pada periode pembangunan lima tahun yang lalu (RPJMD 2010-2015) telah banyak program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Tetapi pada kenyataannya angka kemiskinan tersebut belum benar-benar berkurang. Diantara rumah tangga miskin menurut data tersebut (yang masuk Data Base) memang ada yang sudah meningkat taraf hidupnya, namun banyak pula rumah tangga yang dulu hampir miskin sekarang ini malah menjadi miskin. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin.

Dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan menggunakan pendekatan Cluster sebagaimana yang diarahkan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak mungkin dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab sebuah SKPD. Karena itu untuk efektifnya program-program pengentasan kemiskinan sangat diperlukan sinergisitas dan keterpaduan agar program-program tersebut tepat sasaran. Pemerintah Nagari menjadi ujung tombak suksesnya program pengentasan kemiskinan. Perusahaan - perusahaan melalui CSR nya (Coorporate Social Responsibility) dan perantau selama ini ikut

berperan dalam pengentasan kemiskinan. Ke depan peranan ini harus tetap didorong untuk lebih aktif. Beberapa program yang sudah dilaksanakan selama ini dapat dilanjutkan seperti penanggulangan kemiskinan berbasis masjid, pembebasan biaya berobat, beasiswa, jaminan kesehatan, beras murah, rehab rumah dan lain-lain. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana program-program yang disusun pemerintah daerah mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, sehingga tidak selalu atau terbiasa bergantung kepada berbagai macam bantuan.

2. Pengurangan Angka Pengangguran

Apabila dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Agam maka pada tahun 2015-2025 diperkirakan jumlah penduduk yang memasuki usia angkatan kerja akan melonjak. Di satu sisi hal ini positif karena tersedianya tenaga kerja yang cukup untuk kegiatan produksi, namun disisi lain akan berpotensi meningkatkan angka pengangguran terbuka. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan ketenaga kerjaan harus berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru, mendorong pendidikan keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja dan mempersiapkan tenaga kerja siap pakai, mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah seperti UMKM, Industri pengolahan yang sesuai dengan potensi daerah atau program-program padat kerja lainnya.

6. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Misi 6

Misi Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan

bertujuan untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis lingkungan dan mitigasi bencana dan menjadikan Kabupaten Agam sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.

7. Strategi dan Arah dalam Penataan Pembangunan Ruang

Dalam mewujudkan penataan ruang daerah masih ditemui beberapa hambatan mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban. Untuk itu strategi dan arah pembangunan penataan ruang dimulai dengan menyelesaikan dan menyempurnakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengacu pada peraturan perundangan terbaru. Selanjutnya memperbaharui dokumen perencanaan tata ruang lainnya sesuai dengan RTRW tersebut.

8. Strategi dan Arah Pembangunan dalam Pelestarian Sumberdaya Alam dalam rangka Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Lingkungan yang lestari pada hakekatnya adalah mengelola interaksi antara manusia dan lingkungan, dalam suatu proses koordinasi dengan melakukan pendekatan secara holistik dan adaptif, dalam konteks desentralisasi, globalisasi dan good environment governance dengan tujuan akhir keseimbangan antara kualitas lingkungan dan kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup difokuskan pada upaya penanggulangan pencemaran Danau Maninjau dan sungai-sungai utama Kabupaten Agam yaitu Batang Agam, Batang Sianok, Batang Antokan, Batang Kalulutan, Batang Tiku, Batang Masang dan Batang Dareh.

Kemudian dalam rangka antisipasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim dilakukan peningkatan konservasi dan mengurangi tekanan terhadap lingkungan antara lain adalah melaksanakan pengelolaan pemanfaatan air; pengadaan sistem transportasi masal dalam rangka mengurangi emisi gas buang; mencegah kerusakan hutan (penebangan dan kebakaran), melaksanakan penghijauan kembali lahan kritis, serta peningkatan sistem pengolahan sampah.

Peningkatan sistem pengelolaan persampahan perlu dibenahi dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pembenahan manajemen persampahan, peningkatan kemampuan personil pengelola, serta pemenuhan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih. Menfasilitasi penyediaan TPS dan membudayakan pengolahan sampah ditempat secara mandiri merupakan upaya mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA. Kemudian dalam rangka mewujudkan kota hijau yang asri dan produktif dilaksanakan dengan strategi pembuatan taman kota dan menggerakkan masyarakat guna memanfaatkan semua lahan yang ada untuk menanam tanaman produktif seperti buah-buahan berbagai jenis. Gerakan ini termasuk salah satu cara mewujudkan AOBIT (one billion tree) dengan menggalakkan penanaman pohon buah dimanapun dan oleh siapapun. Disamping itu ditingkatkan rumah tangga juga ditingkatkan kesadaran menanam bunga untuk mewujudkan keindahan lingkungan serta dapur dan apotik hidup untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga.

D. Profil Indra Catri

Ir. H. Indra Catri, Dt. Malako Nan Putih (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 4 April 1961) adalah Bupati Agam, Sumatera Barat periode 2010-2015. Ia

dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010 di GOR Rang Agam Padang Baru, Lubuk Basung. Berpasangan bersama H. Umar sebagai Wakil Bupati, mereka berhasil memenangi Pilkada Kabupaten Agam pada tahun 2010.

Pendidikan

- S1 dari Institut Teknologi Bandung (1987)

Riwayat Jabatan

- Kasi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Kota Padang (1990)
- Kabid Statistik dan Laporan Bappeda Kota Padang (1990)
- Kasubag Diklat Bagian Kepegawaian Kota Padang (1995)
- Kabag Kepegawaian Kota Padang (1996)
- Kepala Kantor PMD Kota Padang (1997)
- Kasubdin Nilai Budaya dan Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang (2001)
- Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang (2001)
- Asisten Bidang Kesra Kota Padang (2002)
- Kepala Dinas Infokom Kota Padang (2003)
- Kepala Badan Capil dan Kependudukan Kota Padang (2005)
- Asisten Bidang Kesra Kota Padang (2006)
- Kepala Bappeda Kota Padang (2008)
- Bupati Agam (2010 - 2015)

E. Profil Aristo Munandar

Drs. H. Aristo Munandar (lahir di Koto Hilalang, IV Angkek, Agam, Sumatera Barat, 15 Oktober 1950) adalah seorang birokrat dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat Bupati Agam, Sumatera Barat periode 2000-2005 dan 2005-

2010. Saat ini ia bekerja sebagai seorang Dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014 - 2019 dari Partai Golkar.

Riwayat Pendidikan

- Sekolah Rakyat Koto Hilalang, Agam, lulus tahun 1963
- SMP Simpang Candung, Agam, lulus tahun 1966
- SMA Negeri 1 Bukittinggi, lulus tahun 1969
- D.3 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat, lulus tahun 1973
- S.1 Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, lulus tahun 1983

Karier Birokrat dan Politik

Setelah lulus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Baso, Agam pada tahun 1973, Aristo memulai karier dibidang birokrat sebagai Pelaksana Unit LPN Agam pada tahun 1975 sampai 1976. Setelah itu, ia diangkat sebagai Camat Baso, Baso, Agam pada tahun 1976 hingga 1981. Setelah menyelesaikan pendidikan pada Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta pada tahun 1983, kemudian Ia dipindah Tugas ke Kota Padang sebagai Camat Nanggalo, Kota Padang pada tahun 1984 hingga tahun 1987 setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai Koordinator Staf Pribadi Walikota Padang. Ia dipromosikan sebagai Kepala Bagian Humas Pemko Padang dari tahun 1987 hingga 1988. Akhirnya, ia mengakhiri karier di Padang sebagai Kepala Kantor Sospol dari tahun 1988 hingga 1994.

Ia dimutasi ke Kota Sawahlunto sebagai Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto dari tahun 1995 sampai 1997. Setelah itu, ia ditempatkan pada jabatan

Inspektur Wilayah Kota Sawahlunto dari tahun 1997 hingga 1988. Pada tahun 1998, ia dimutasi kembali ke kampung halaman (Agam) sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Agam hingga tahun 2000. Setelah itu, melalui sistem perwakilan di DPRD Kabupaten Agam, ia terpilih sebagai Bupati Agam ke-13 bersama Syafruddin Arifin sebagai Wakil Bupati Agam. Pada tahun 2005, ia mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Agam dan terpilih bersama Ardinah Hasan yang diangkat oleh Pjs. Gubernur Sumbar, Thamrin pada tanggal 13 Agustus 2005 hingga 13 Agustus 2010.

Pada tahun 2010, ia bersama dengan Marlis Rahman mengikuti Pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2010. Ia berhasil menjadi pemenang kedua dengan hasil 531.605 suara sah (26,37 %). Pemenang pemilihan umum ini adalah pasangan Irwan Prayitno dan Muslim Kasim dengan hasil 657,763 suara sah (32,63 %).

Ia saat ini tercatat sebagai Dosen pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014 - 2019 dari Partai Golkar Dapil Sumbar 3 (Kabupaten Agam dan Bukittinggi).

Pengalaman Organisasi

- 1968 s/d 1969 : Ketua ISMA di Bukittinggi
- 1974 s/d 1975 : Wakil Ketua KNPI Kabupaten Agam
- 1976 s/d 1980 : Ketua KNPI Kabupaten Agam
- 1985 s/d 1988 : Wakil Ketua KNPI Sumatera Barat
- 1985 s/d 1990 : Wakil Sekretaris KOMDA PSSI
- 1990 s/d 1995 : Sekretaris Umum PSP Sumbar

- 1994 s/d 1995 : Ketua BP3 SMP 1 Padang
- 2000 s/d sekarang : Ketua Umum KONIDA Kabupaten Agam
- 1998 s/d 2000 : Ketua PELTI Kabupaten Agam
- 2002 s/d 2009 : Pembina BKPRMI Kabupaten Agam
- 2002 s/d 2005 : Ketua Bidang Organisasi KONI Sumbar
- 2005 : Wakil Korwil Sumbar APKASI

Riwayat Jabatan

- 
- Pelaksana Unit LPN Kabupaten Agam (1975-1976)
 - Camat Baso Kabupaten Agam (1976-1981)
 - Koordinator Sekretaris Pribadi Walikota Padang (1983 - 1984)
 - Camat Nanggalo Kota Padang (1984-1987)
 - Kabag Humas Kota Padang (1987-1988)
 - Kepala Kantor Sospol Kota Padang (1988-1994)
 - Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto (1995-1997)
 - Inspektur Wilayah Kota Sawahlunto (1997-1998)
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Agam (1998-2000)
 - Bupati Agam (2000-2005)
 - Bupati Agam (2005-2010)
 - Anggota DPRD Sumatera Barat (2014-sekarang)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan dan memaparkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Data tersebut berupa informasi yang didapatkan melalui wawancara bersama informan penelitian yakni Bupati Agam periode 2005-2010, Kabid. Yanses Kesos, Inspektorat, Kasubid. Sumber Daya Manusia Periode (2005-2010), Bupati Agam 2010-2015, Kasubid. Sosial, Kabid. Jaminan dan Kesehatan dan Kasubid. Pertanian Kehutanan dan Kelautan.

Kemudian untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dari informan tersebut, peneliti melakukan triangulasi data dengan mewawancarai informan triangulasi. Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan data dari informan triangulasi, barulah kemudian peneliti menggunakan data tersebut untuk menguji kebenaran dari data yang peneliti dapatkan dari informan sebelumnya. Dalam mengolah data peneliti menggunakan analisis etik dan emik, dimana etik merupakan interpretasi peneliti sendiri yang kemudian dikaitkan dengan kajian ilmu politik, sedangkan emik merupakan analisis yang diinterpretasikan oleh informan sendiri. Adapun informan triangulasi yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bappeda 2005-2010 , Sekretaris Daerah 2005-2010, dan Kepala Bappeda 2010-2015 serta Sekda 2010-2015 Kabupaten Agam.

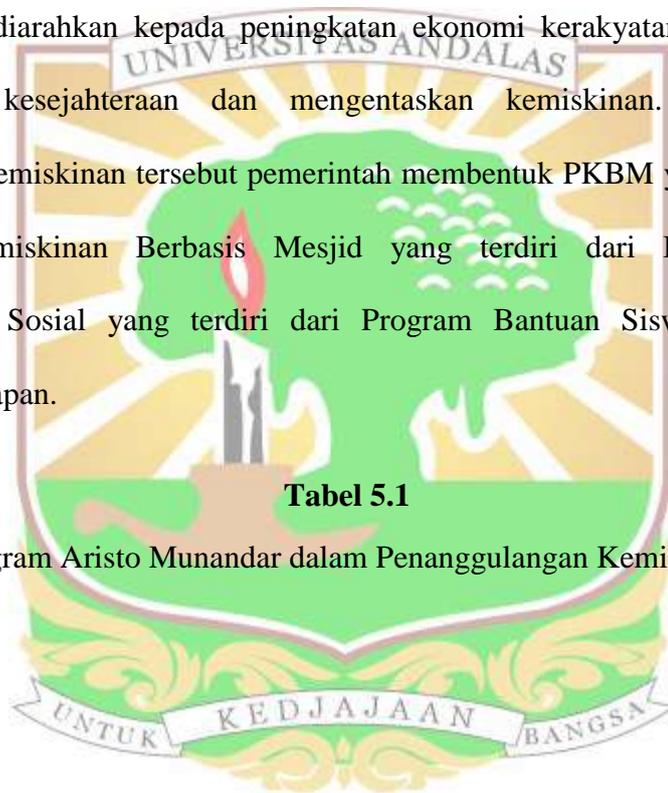
A. Upaya Pemerintah Agama dalam Mengentaskan Kemiskinan

1. Program Kerja Aristo Munandar

Dalam RPJM menjelaskan pembentukan TKPK, dampak pembangunan yang tidak merata dan seimbang mengakibatkan terjadinya kemiskinan pada sekelompok masyarakat. Program pembangunan dan penyuluhan kepada masyarakat diarahkan kepada peningkatan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Maka dalam mengurangi kemiskinan tersebut pemerintah membentuk PKBM yang merupakan Program Kemiskinan Berbasis Masjid yang terdiri dari BMT, Program Perlindungan Sosial yang terdiri dari Program Bantuan Siswa Miskin dan Keluarga Harapan.

Tabel 5.1

Program Aristo Munandar dalam Penanggulangan Kemiskinan



No	Program	Indikator	Sasaran			Ket
			2008	2009	2010	
Dinas Kesehatan						
1	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	Jml masyarakat miskin yang memperoleh kesehatan	50.173 jiwa	50.173 jiwa	50.173 jiwa	APBN
2	PMT Pemulihan Balita Gizi Kurang dan Buruk	Jml KK dari balita gizi buruk dan gizi kurang yang mendapat pengobatan dan perawatan	19 kk	25 kk	60 kk	APBD
3	PMT Pemulihan Bumil Kekurangan Energi Kronis	Jml bumil yang mendapatkan perawatan dan pengobatan	16 kk	22 kk	35 kk	APBN
4	Operasi Katarak	Jml penderita katarak keluarga miskin yg operasi	59 mata	159 mata	98 mata	APBD
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Aspek pendidikan dan kesehatan keluarga miskin			3.000 RT	APBN
2	Jaminan sosial lanjut usia terlantar	Lansia keluarga miskin yang mendapat jaminan sosial	52 org	110 org	112 org	APBN
3	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana prasarana reha kessos bagi PMKS	Rumah tidak layak huni masyarakat miskin yang direhab	2 unit	4 unit	57 unit	APBD
Dinas Pendidikan						
1	Pendidikan Wajar Pendidikan Sembilan tahun/ Penyediaan Beasiswa	Siswa keluarga kurang mampu tk SD yang dapat beasiswa	5.200 siswa	5.088 siswa	4.835 siswa	APBN
2	Program Wajar Pendidikan Sembilan Tahun	Siswa keluarga kurang mampu tk SMP yang dapat beasiswa	363 siswa	363 siswa	363 siswa	APBN
3	Program Pendidikan Menengah	Siswa keluarga kurang mampu tk SMA yang dapat beasiswa	998 siswa	998 siswa	998 siswa	APBN

Tabel 5.1

Program Aristo Munandar Dalam Penanggulangan Kemiskinan (lanjutan)



No	Program	Indikator	Sasaran			Ket
			2011	2012	2013	
Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan						
1		Bantuan bahan sembako untuk KK/ Miskin	1.185 kk	4.478 kk	1.500 kk	APBD
Dinas Kesehatan						
1	Industri RT Pangan	Industri kecil dan RT yg mendapatkan pelatihan	55 org	30 org	5 org	APBD
2	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	Jml masyarakat miskin yang memperoleh kesehatan	45.135 jiwa	45.135 jiwa	45.135 jiwa	APBN
Bagian Perekonomian						
1	Fasilitas Pengelola dan Distribusi Bahan Pangan	Masyarakat miskin dan hampir miskin yang telah menerima raskin	9.735 RT	9.735 RT	9.735 RT	APBN
2	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	Jml masyarakat miskin yang memperoleh kesehatan	46.035 jiwa	46.035 jiwa	46.035 jiwa	APBN
Bagian Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari						
1	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	Masyarakat yang memiliki UMKM	599 org	1.800 org	1.525 org	APBN
2	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rumah masyarakat yang belum memiliki aliran listrik, pelestarian lingkungan dan peningkatan kapasitas	335 org			APBN
Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Petani miskin yang mendapatkan insentif dan disinsentif		110 kk	110 kk	35 juta
Dinas Pekerjaan Umum						
1	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan	Jumlah masyarakat yang menerima PNPB Mandiri Perkotaan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	APBN
Dinas Pendidikan						
1	Program Peningkatan life skill	Jumlah masyarakat yang mendapatkan life skill	130 org	35 org	48 org	APBN

Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Agam 2006-2010

Tabel diatas merupakan bentuk kerja sama Pemerintahan dengan berbagai dinas untuk menjalankan indikator program dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pemerintahan Aristo Munandar.

Mengenai hal ini, Aristo Munandar menjelaskan bahwa pemerintah berperan cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan³³.

“Dahulunya saat saya menjabat penanganan kemiskinan bersentuhan dengan masyarakat miskin, memberikan bantuan sesuai sasaran yaitu by name, by adress. Data harus by name by adress , masalah pendataan harus terperinci. Kegiatan koperasi untuk BMT, menggerakkan partisipasi rakyat. Program pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat harus menggerakkan civil society, harus adanya kesamaan pandang antara masyarakat dan pemerintah. Kemiskinan merupakan gerakan dari bawah, Agam makmur merupakan program unggulan caranya dengan

³³Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

mengumpulkan masyarakat ke mesjid mengundang niniak mamak untuk melakukan musyawarah untuk melaksanakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut disebut mamak yaitu musyawarah syarak nagari. Keberhasilan semua pihak dalam mengurangi angka kemiskinan bukan cuma pemerintah³⁴”.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti memahami bahwa masa pemerintahan Aristo Munandar mempunyai strategi khusus dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu Kemiskinan berbasis mesjid, beliau mengumpulkan masyarakat seperti niniak mamak persuku dengan melakukan musyawarah untuk program apa saja yang dilakukan, bagi masyarakat yang tidak hadir ke mesjid tersebut maka tidak akan dapat dalam menjalankan program yang telah di musyawarahkan.

Dalam mendata kemiskinan harus terperinci sehingga data yang dibuat harus by name by adress, sehingga dengan begitu bantuan yang diberikan tidak salah sasaran dan masyarakat miskin benar-benar dapat terbantu. Aristo juga berpendapat bahwa masyarakat harus dijadikan mitra karena pemerintah tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa bantuan civil society.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasubid Bidang Sosial Kabupaten Agam Zulfi Ernawati tentang keterlibatan pemerintah dalam menangani permasalahan publik dibandingkan dengan wilayah cakupan keterlibatan masyarakat³⁵.

“Dulunya Penanggulangan kemiskinan itu berdasarkan bidang yang diperlukan oleh masyarakat, Pengentasan berbasis mesjid PKBM, adanya

³⁴Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

³⁵Lihat wawancara peneliti dengan Zulfi Ernawati selaku Kasubid Pertanian Kehutanan dan Kelautan Tanggal 21 Desember 2016 di Kantor Dinas Sosial pukul 09.05 wib

sosialisasi dengan masyarakat persuku, kegiatan dilakukan di mesjid agar masyarakat dapat berkumpul, hidup miskin dan agama miskin, agar membentuk prilaku masyarakat, menarik masyarakat dengan melakukan program dengan mengundang masyarakat ke mesjid. Adanya program raskin diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tujuan program ini untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah tangga sasaran dalam bentuk beras dan mencegah konsumsi energi dan protein”.

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa kebutuhan penanggulangan kemiskinan memang harus berdasarkan kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri. Maka dilakukanlah sosialisasi dengan masyarakat persuku yang kegiatan tersebut dilakukan di dalam mesjid agar mengingatkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat. Adanya program Raskin diperuntukan untuk masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan.

Berikut pernyataan informan triangulasi H. Syafirman, SH selaku Sekretaris Daerah (2005-2010) Kabupaten Agam³⁶.

“Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus disempurnakan, selain program kemiskinan berbasis mesjid yang dikenal dengan PKBM yang merupakan program unggulan Agam Makmur, raskin dan program jamkesda diselenggarakan untuk meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif. Namun dalam penanggulangan kemiskinan juga ada perlibatan stakeholder, penanggulangan kemiskinan kiranya bukan hanya tanggungjawab sepenuhnya Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah namun juga semua pihak terutama masyarakat miskin juga harus terlibat.”

Berdasarkan hal diatas peneliti memahami dari informan triangulasi bahwa pemerintah terus berusaha dalam melakukan penanggulangan kemiskinan diantaranya kemiskinan berbasis mesjid. Program unggulan yang dijalankan pemerintah pada masa pemerintahan Aristo Munandar yaitu Agam Makmur. Adanya program jamkesda ditujukan untuk meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat hidup sehat. Namun hal yang diperlukan harus

³⁶Lihat wawancara peneliti dengan H. Syafirman selaku Sekretris Kabupaten Agam (2005-2010) Tanggal 3 Februari 2017 di Tengah Jua pukul 14.30 wib

adanya kesadaran masyarakat miskin itu sendiri agar setiap program yang dijalankan berjalan efektif.

2. Program Kerja Indra Catri

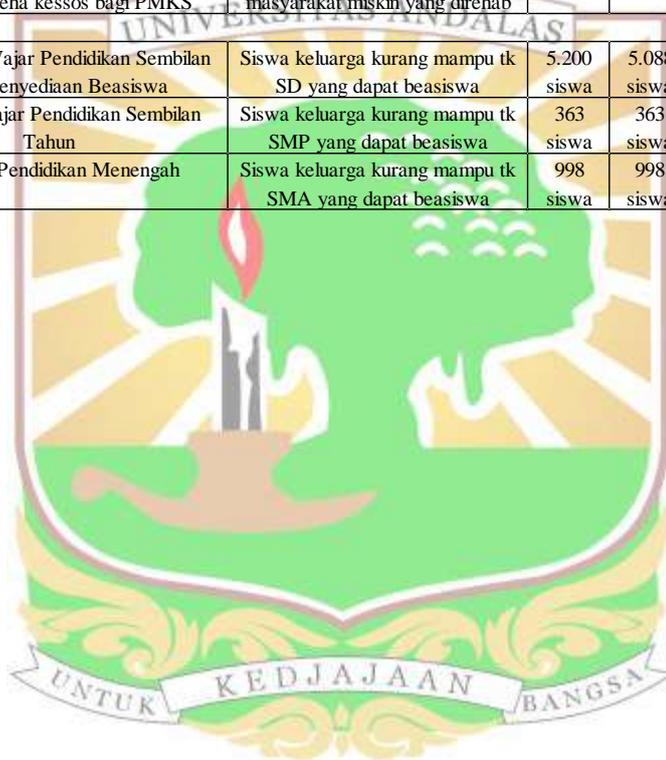
Dalam RPJM Langkah kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan masalah kemiskinan dilakukan untuk memenuhi hak dasar penduduk miskin antara lain dalam hal penyediaan dan perluasan akses pangan, perluasan akses layanan kesehatan, perluasan akses layanan pendidikan, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perluasan akses perumahan, penyediaan air bersih. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan kesetaraan gender serta pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana.



Tabel 5.2

Program Indra Catri Dalam Penanggulangan Kemiskinan

No	Program	Indikator	Sasaran			Ket
			2011	2012	2013	
Dinas Kesehatan						
1	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	Jml masyarakat miskin yang memperoleh kesehatan	50.173 jiwa	50.173 jiwa	50.173 jiwa	APBN
2	PMT Pemulihan Balita Gizi Kurang dan Buruk	Jml KK dari balita gizi buruk dan gizi kurang yang mendapat pengobatan dan perawatan	19 kk	25 kk	60 kk	APBD
3	PMT Pemulihan Bumil Kekurangan Energi Kronis	Jml bumil yang mendapatkan perawatan dan pengobatan	16 kk	22 kk	35 kk	APBN
4	Operasi Katarak	Jml penderita katarak keluarga miskin yg operasi	59 mata	159 mata	98 mata	APBD
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Aspek pendidikan dan kesehatan keluarga miskin			3.000 RT	APBN
2	Jaminan sosial lanjut usia terlantar	Lansia keluarga miskin yang mendapat jaminan sosial	52 org	110 org	112 org	APBN
3	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana prasarana reha kessos bagi PMKS	Rumah tidak layak huni masyarakat miskin yang direhab	2 unit	4 unit	57 unit	APBD
Dinas Pendidikan						
1	Pendidikan Wajar Pendidikan Sembilan tahun/ Penyediaan Beasiswa	Siswa keluarga kurang mampu tk SD yang dapat beasiswa	5.200 siswa	5.088 siswa	4.835 siswa	APBN
2	Program Wajar Pendidikan Sembilan Tahun	Siswa keluarga kurang mampu tk SMP yang dapat beasiswa	363 siswa	363 siswa	363 siswa	APBN
3	Program Pendidikan Menengah	Siswa keluarga kurang mampu tk SMA yang dapat beasiswa	998 siswa	998 siswa	998 siswa	APBN



Tabel 5.2

Program Indra Catri Dalam Penanggulangan Kemiskinan (lanjutan)

No	Program	Indikator	Sasaran			Ket
			2011	2012	2013	
Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan						
1		Bantuan bahan sembako untuk KK/ Miskin	1.185 kk	4.478 kk	1.500 kk	APBD
Dinas Kesehatan						
1	Industri RT Pangan	Industri kecil dan RT yg mendapatkan pelatihan	55 org	30 org	5 org	APBD
2	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	Jml masyarakat miskin yang memperoleh kesehatan	45.135 jiwa	45.135 jiwa	45.135 jiwa	APBN
Bagian Perekonomian						
1	Fasilitas Pengelola dan Distribusi Bahan Pangan	Masyarakat miskin dan hampir miskin yang telah menerima raskin	9.735 RT	9.735 RT	9.735 RT	APBN
2	Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)	Jml masyarakat miskin yang memperoleh kesehatan	46.035 jiwa	46.035 jiwa	46.035 jiwa	APBN
Bagian Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari						
1	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	Masyarakat yang memiliki UMKM	599 org	1.800 org	1.525 org	APBN
2	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rumah masyarakat yang belum memiliki aliran listrik, pelestarian lingkungan dan peningkatan kapasitas	335 org			APBN
Dinas Kehutanan dan Perkebunan						
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Petani miskin yang mendapatkan insentif dan disinsentif		110 kk	110 kk	35 juta
Dinas Pekerjaan Umum						
1	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan	Jumlah masyarakat yang menerima PNPB Mandiri Perkotaan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	APBN
Dinas Pendidikan						
1	Program Peningkatan life skill	Jumlah masyarakat yang mendapatkan life skill	130 org	35 org	48 org	APBN

Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Agam 2011-2015

Tabel diatas merupakan bentuk kerja sama Pemerintahan dengan berbagai dinas untuk menjalankan indikator program dalam penanggulangan kemiskinan pada masa pemerintahan Indra Catri.

Adapun tanggapan Bupati Agam Indra Catri menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan peranan yang cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan³⁷.

“Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan pastinya dilakukan dengan program. Program yang kami lakukan yaitu program agam menyemai, dengan memberikan nilai-nilai kebaikan dalam memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan lainnya untuk ditanam bibit sayuran maupun buah-buahan agar masyarakat dapat bercocok tanam dan hasil tersebut dapat digunakan sendiri maupun untuk dijual, serta memberikan bibit ikan untuk mengisi kolam-kolam yang selama ini blum

³⁷Lihat wawancara peneliti dengan Indra Catri selaku Bupati Agam Tanggal 8 Februari 2017 di Rumah Dinas Bupati pukul 15.00 wib

dimamfaatkan. Dengan program tersebut tentunya membawa manfaat dan pendapatan ekonomi baik di lingkungan sendiri maupun lingkungan masyarakat lainnya”.

Berdasarkan hal diatas peneliti memahami upaya pemerintah harus dilakukan dengan menjalankan program. Pada masa pemerintahan Indra Catri program yang dijalankan adalah program agam menyemai. Dimana program tersebut memamfaatkan berbagai lahan yang ada diantaranya lahan pekarangan, lahan halaman rumah untuk berbocok tanam. Pemerintah memberikan bibit tanaman dan sayuran yang nantinya juga dapat dimamfaatkan untuk memenuhi kebutuhan namun juga memilki mamfaat ekonomi jika dijual ke pasar. Pemerintah juga memberikan bibit ikan untuk kolam yang selama ini tidak dimamfaatkan. Program tersebut dapat memberikan mamfaat untuk lingkungan sendiri maupun lingkungan lainnya.

Kasubid Bidang Sosial Diah Evihabsari, juga menyatakan keterlibatan pemerintah yang cukup besar dalam menangani permasalahan publik dibandingkan dengan wilayah cakupan keterlibatan swasta³⁸.

“Tujuan jangka pendek dari program Keluarga Harapan dari program ini adalah mengurangi beban (RTSM) rumah tangga sangat miskin, sedangkan jangka panjang diharapkan dapat memutus mata memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Dengan mengikuti program ini, diharapkan RTSM keluar dari perangkat kemiskinan. Salah satu program yang dilakukan dengan memberikan bibit unggul kepada masyarakat dengan memberikan lahan maupun yang memiliki lahan sendiri untuk ditanami bibit tersebut dan juga memberikan bibit ikan untuk mengisi kolam-kolam yang selam ini tidak dimamfaatkan. Masyarakat tidak perlu lagi ke pasar untuk membeli ke pasar, namun masyarakt juga dapat menjual hasil bibit tersebut ke pasar.

³⁸Lihat wawancara peneliti dengan Diah Evihabsari selaku Kasubid Pertanian Kehutanan dan Kelautan Tanggal 23 Desember 2016 di Kantor BAPPEDA pukul 15.05 wib

Berdasarkan hal diatas peneliti memahami Program keluarga harapan untuk mengurangi beban rumah tangga, sedangkan mamfaat jangka panjang yang diharapkan oleh pemerintah dapat memutus mat rantai kemiskinan sampai ke generasi selanjutnya. Sesuai dengan wawancara sebelumnya bahwa program agam menyemai menjad program prioritas bagi pemerintah untu memberikan bibit unggul kepada masyarakat untuk ditanam di berbagai pekarangan maupun lahan. Hasil dari tanaman yang ada dapat dijual dan dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat.

Pernyataan oleh informan triangulasi Martias Wanto, SH selaku Sekretaris Daerah (2010-2015) Kabupaten Agam, berikut pernyataannya³⁹:

“Kebijakan penanggulangan kemiskinan terus dioptimalkan dengan usaha serta peningkatan pelayanan, program pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan, TKPK Agam saat ini melakukan pemberian bibit kepada masyarakat untuk di tanami bibit unggul dn juga bibit ikan untu mengisi kolam, kemudian sehingga waktunya telah ditiba dapat disemai dan memberikan mamfaat ekonomi bagi masyarakat.”

Berdasarkan hal diatas bahwa pemerintah juga memahami peningkatan pelayanan juga perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Tim yang dibentuk pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan memberikan bibit untuk ditanam di sekitar pekarangan maupun lahan, Kemudian sampia waktunya tiba dapat disemai oleh masyarakat dan memberikan mamfaat ekonomi bagi masyarakat.

3. Program yang Membedakan Kedua Pemimpin

Dalam masa pemerintahan Aristo Munandar terdapat program unggulan yaitu Agam Makmur. Agam makmur ini merupakan kegiatan berbasis mesjid

³⁹Lihat wawancara peneliti dengan Martias Wanto selaku SekdaKabupaten Tanggal 6Februari 2017 di Kantor Bupati pukul 14.30 wib

dimana pada saat itu masyarakat dihimbau untuk datang ke mesjid dengan mengundang niniak mamak beserta alim ulama. Kemudian melakukan musyawarah dengan mendengarkan keluhan maupun kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Niniak mamak nagari tersebut memberitahukan kepada masyarakat program yang yang dibutuhkan pada saat itu. Aristo Munandar tidak menggunakan data sampling namun beliau menggunakan data by name by address, sehingga dengan menggunakan data tersebut tidak salah sasaran dan bantuan tersebut dapat langsung diterima oleh masyarakat.

Mengenai hal ini, Aristo Munandar menjelaskan mengenai program Agam Makmur⁴⁰.

“Dahulunya saat saya menjabat penanganan kemiskinan bersentuhan dengan masyarakat miskin, memberikan bantuan sesuai sasaran yaitu by name, by adress. Data harus by name by adress, masalah pendataan harus terperinci. Kegiatan koperasi untuk BMT, menggerakkan partisipasi rakyat. Program pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat harus menggerakkan civil society, harus adanya kesamaan pandang antara masyarakat dan pemerintah. Kemiskinan merupakan gerakan dari bawah, Agam makmur merupakan program unggulan caranya dengan mengumpulkan masyarakat ke mesjid mengundang niniak mamak untuk melakukan musyawarah untuk melaksanakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut disebut mamas yaitu musyawarah syarak nagari. Keberhasilan semua pihak dalam mengurangi angka kemiskinan bukan cuma pemerintah⁴¹”.

Berdasarkan hal diatas peneliti memahami bahwa data kemiskinan harus by name by adress dan terperinci agar masyarakat dapat mendapat bantuan dan tidak salah sasaran. Aristo Munandar menyatakan bahwa kemiskinan tersebut gerakan dari bawah bukan dari atas, maksudnya disini bukan pemerintah yang melakukan segalanya walaupun memiliki wewenang akan tetapi aspirasi

⁴⁰Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

⁴¹Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

masyarakat harus didengarkan karena masyarakat lah yang tahu apa yang mereka butuhkan. Sehingga pada saat melakukan program maka masyarakat dikumpulkan berdasarkan suku dengan mengundang niniak mamak. Keberhasilan dari penanggulangan kemiskinan bukan hanya d tangan pemerintah akan tetapi ditangan semua pihak yang terlibat.

Sedangkan pada masa pemerintahan Indra Catri terdapat program unggulan yaitu Agam menyemai. Agam menyemai merupakan program yang mencoba membangun dan memotivasi masyarakat melalui suatu gerakan dalam memanfaatkan lahan pekarangan, lah perkantoran, lahan mesjid dengan menanam tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.

Masyarakat juga dimotivasi untuk mengisi kolam yang selama ini tidak dimanfaatkan selama ini dengan ikan. Dapat memberikan mamfaat ekonomi, baik lingkungan sendiri maupun masyarakat. Perlunya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan agar program tersebut dapat dilanjutkan.

Berdasarkan tanggapan Bupati Agam Indra Catri menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan peranan yang cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan⁴².

“Program yang kami lakukan yaitu program agam menyemai, dengan memberikan nilai-nilai kebaikan dalam memafaatkan lahan pekarangan maupun lahan lainnya untuk ditanam bibit sayuran maupun buah-buahan agar masyarakat dapat bercocok tanam dan hasil tersebut dapat digunakan sendiri maupun untuk dijual, serta memberikan bibit ikan untuk mengisi kolam-kolam yang selama ini blum dimanfaatkan. Dengan program tersebut tentunya membawa manfaat dan pendapatan ekonomi baik di lingkungan sendiri maupun lingkungan masyarakat lainnya”.

⁴²Lihat wawancara peneliti dengan Indra Catri selaku Bupati Agam Tanggal 8 Februari 2017 di Rumah Dinas Bupati pukul 15.00 wib

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa Program agama menyemai selain memberikan bibit tanaman maupun sayuran kepada masyarakat akan tetapi juga terdapat nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan kepada masyarakat. Masyarakat juga memanfaatkan kolam yang digunakan untuk dimasukan ikan yang nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan.

B. Analisis Perbandingan

1. Cakupan Wilayah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Mengenai hal ini, Aristo Munandar menjelaskan bahwa pemerintah berperan cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan daripada pihak swasta⁴³.

“Pemerintah dalam hal ini berperan dalam membuat dan melaksanakan program sedangkan pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan. Adanya dana CSR dari Swasta, yaitu kebijakan dana tanggung jawab sosial untuk kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Agam. serta berkontribusi dalam proses pembangunan program pemerintahan seperti bantuan dana seperti adanya KSBMT, yaitu memberikan dana kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha⁴⁴”.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti memahami bahwa pihak swasta juga dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan. Adanya dana CSR dari pihak swasta juga diperlukan untuk dimanfaatkan untuk BMT yaitu berbentuk pinjaman dana diberikan kepada masyarakat sebagai modal usaha.

⁴³Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

⁴⁴Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

Hal itu juga diakui oleh kepala BAPPEDA Kabupaten Agam Ir. Isman Imran sebagai berikut⁴⁵.

“Pemerintah dalam hal ini berperan dalam pembuatan kebijakan RPJM dan program, sedangkan pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan dana CSR sebagai tanggung jawab dalam pemamfaatan sumber daya di Kabupaten Agam ini serta berkontribusi dalam proses pembangunan program pemerintahan. perbaikan rumah yang tidak layak huni dan bahan-bahan yang diperlukan dalam menjalankan program tersebut. Namun dalam penanggulangan kemiskinan juga memerlukan melibatkan stakeholder, sehingga penanggulangan kemiskinan kiranya bukan hanya tanggung jawab sepenuhnya Pemerintahan Daerah namun juga semua pihak terutama masyarakat miskin itu sendiri”.

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa penanggulangan kemiskinan juga memerlukan melibatkan stakeholder, sehingga penanggulangan kemiskinan kiranya bukan hanya tanggung jawab sepenuhnya Pemerintahan Daerah namun juga semua pihak terutama masyarakat miskin itu sendiri. Dana CSR yan diterima oleh penrintah dapat dimaafkan dengan efektif dan efisien untuk mengurangi angka kemiskina dan pengangguran. Dana tersebut uga dapat dibrikan kepada masyarakt untuk perbaikan rumah tidak layak huni sehingga masyrakat dapat memperbaiki rumahnya agar layak untuk ditempati.

Berdasarkan teori *Type Choices of Scope* (pilihan wilayah cakupan) ini menganalisis sejauh mana peran dan tanggungjawab *public* (pemerintah) dibandingkan dengan peran dan tanggung jawab *private* (swasta) dalam menangani masalah kebijakan. Dengan kata lain, sejauh mana wilayah cakupan keterlibatan pemerintah dalam menangani permasalahan public dibandingkan dengan wilayah cakupan keterlibatan swasta (*private*). Bahwa pemerintah memang memegang peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan,

⁴⁵ Lihat wawancara peneliti dengan Ir. Isman Imran selaku Kepala Bappeda (2005-2010) Kabupaten Agam Tanggal 6 Februari 2017 di Kantor Bupati Agam pukul 15.00 wib

Pemerintah mengajak dan memerlukan pihak swasta dalam menjalankan beberapa program yaitu KSBMT sebagai koperasi kerakyatan, masyarakat diberikan bantuan dana untuk menjalankan usaha. Bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya di Kabupaten Agam juga terdapat dana CSR, sehingga dana tersebut dapat digunakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan tanggapan dan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan swasta maka sangat berpotensi untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, sebab dana CSR dari perusahaan jika dikelola dengan baik akan sangat efektif untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Agam bahkan akan jauh lebih efektif dibandingkan program bantuan langsung tunai yang dijalankan oleh pemerintah.

Sedangkan tanggapan dari Indra Catri Adapun tanggapan Bupati Agam Indra Catri menjelaskan bahwa saat ini pemerintah juga memberikan peranan yang cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan dengan pihak swasta⁴⁶.

“Tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya bahwa pemerintahan saat ini juga memanfaatkan dan CSR dari pihak perusahaan swasta khusus dan tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini pemerintah juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mandiri dan kreatif sehingga dengan begitu penanggulangan kemiskinan dapat teratasi.”

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa pada masa pemerintahan Indra Catri juga memanfaatkan dana CSR dari pihak swasta dalam

⁴⁶Lihat wawancara peneliti dengan Indra Catri selaku Bupati Agam Tanggal 8 Februari 2017 di Rumah Dinas Bupati pukul 15.00 wib

mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Inovasi yang dilakukan oleh masa pemerintahan yaitu dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan pemberdayaan untuk lebih mandiri dan kreatif dengan begitu penanggulangan kemiskinan dapat teratasi.

Pernyataan oleh informan triangulasi Martias Wanto berikut pernyataannya⁴⁷:

“Kabupaten Agam berusaha optimal dalam hal menjalankan program khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan. Upaya kebijakan penanggulangan kemiskinan terus disempurnakan dengan usaha serta peningkatan pelayanan, program pemerintahan bekerja sama dengan perusahaan swasta sehingga dengan begitu adanya dana CSR yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Agam dapat terealisasi.”

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa pemerintah kabupaten agam berusaha optimal dalam menjalankan program khususnya angka kemiskinan. Pemerintah dalam hal ini juga membutuhkan bantuan pihak swasta untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat terealisasi.

Berdasarkan teori *Type Choices of Scope* (pilihan wilayah cakupan) ini menganalisis sejauh mana peran dan tanggungjawab *public* (pemerintah) dibandingkan dengan peran dan tanggung jawab *private* (swasta) dalam menangani masalah kebijakan. Bahwa masa pemerintah Indra Catri tidak berbeda jauh dengan masa pemerintahan Aristo Munandar. Dalam hal ini kedua masa pemerintahan tersebut tetap memanfaatkan dana CSR dalam penanggulangan kemiskinan. Namun inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan dengan melakukan

⁴⁷Lihat wawancara peneliti dengan Martias Wanto selaku Sekda Kabupaten Tanggal 6 Februari 2017 di Kantor Bupati pukul 14.30 wib

pemberdayaan kepada masyarakat sehingga ini akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat.

2. Instrumen Kebijakan Pengetasan Kemiskinan

Untuk menjelaskan instrument pengentasan kemiskinan, pemda Agam menggunakan program sbagai instrumen. Hal itu dijelaskan oleh Aristo Munandar yang menjelaskan program yang dirancang saat dia menjabat⁴⁸.

“Ada beberapa program lain untuk mengurangi angka kemiskinan pada saat pemerintahan saya. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Agam *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), Setiap program diadakan rapat terlebih dahulu dengan dinas pendidikan, dinas sosial pakai data base, mengadakan rapat agar program berjalan dengan lancar. KSBMT merupakan program kemiskinan, dengan memberikan bantuan, di berikan motor kredit dan mengajak anak tersebut memiliki pekerjaan dan dapat bersekolah. Adakan temu rapat dalam melihat dilapangan dengan camat. KSBMT 300 jt per RT. Namun saat ini menurun kemiskinan hanya angka dengan menggunakan data BPS karena data BPS bersifat sampling, Adanya kegiatan makmur bersama mesjid kegiatan dilakukan persuku dan di sertai niniak mamak, setiap kegiatan di lakukan di dalam mesjid”.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan pemberdayaan ekonomi rakyat, sasaran utamanya merupakan berpihak pada ekonomi kerakyatan. Modal berasal dari masyarakat dan subsidi dari pemerintahan Kabupaten.

Berdasarkan hal diatas peneliti memahami bahwa ada program lain yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya program BMT, sebelum melakukan program maka pemerintah melakukan rapat terlebih dahulu dengan berbagai anggota dinas diantaranya dinas pendidikan dan dinas sosial dengan memakai dat base. Salah satu program tersebut diberikan kepada masyaakat yaitu dengan memberikan kredit motor kemudian motor tersebut digunakan untuk berjualan

⁴⁸Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

sehingga anak dari masyarakat tersebut dapat bersekolah dan juga bekerja. Namun program unggulan berbasis mesjid diterapkan dalam masa pemerintahan Aristo Munandar.

Hal itu juga diakui oleh Sekda Kabupaten Agam H. Syafirman bahwa masalah kemiskinan yang juga berdampak terhadap bidang lain⁴⁹.

“Setahu saya dulunya adanya program penanggulangan kemiskinan berbasis mesjid, dengan mengumpulkan masyarakat di mesjid dengan mengundang para niniak, mamak, alim ulama dan cadiak pandai di kumpulan di mesjid dengan persuku, dan bermusyawarah mengenai program berdasarkan kebutuhan yang di perlukan oleh masing masing persuku tersebut, Tujuan masyarakat mengundang masyarakat agar meningkatkan nilai adat dan nilai agama, itu yang merupakan kelebihan pengentasan kemiskinan berbasis mesjid”.

Berdasarkan hal diatas peneliti memahami bahwa program unggulan kemiskinan diterapkan yaitu program berbasis mesjid dengan cara mengundang niniak mamak dan alim ulama. Kemudian dilakukan musyawarah dan diberitahukan kepada masyarakat lain yang membutuhkan bantuan berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Tujuan lain dilakukan masyarakat mengundang ke mesjid untuk meningkatkan nilai adat dan nilai agama, maka itulah kelebihan kemiskinan yang ada di Kabupaten Agam.

Berdasarkan teori tipe pilihan *instrument* atau alat kebijakan apa yang digunakan dalam struktur pemerintahan sebagai *instrument* kebijakan atau alat-alat lainnya. Kebijakan yang dilakukan masa pemerintahan Aristo Munandar dengan melakukan program Agam Makmur dengan cara mengumpulkan masyarakat di mesjid dengan mengundang para niniak mamak, alim ulama dan

⁴⁹Lihat wawancara peneliti dengan H. Syafirman selaku Sekretris Kabupaten Agam (2005-2010) Tanggal 3 Februari 2017 di Tengah Jua pukul 14.30 wib

cadiak pandai di kumpulan di mesjid dengan persuku, dan bermusyawarah mengenai program berdasarkan kebutuhan yang di perlukan oleh masing masing persuku tersebut, Tujuan masyarakat mengundang masyarakat agar meningkatkan nilai adat dan nilai agama. Program ini merupakan kelebihan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam.

Sedangkan Pernyataan oleh Indra Catri sebagai berikut⁵⁰ :

“Program penanggulangan kemiskinan di Agam saat ini mencoba membangun dan memotivasi masyarakat melalui suatu gerakan moral penyemaian nilai-nilai kebaikan. Agam menyemai merupakan program yang kita lakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan, lahan mesjid, lahan yang tidak produktif dengan menanam sayuran dan buah serta tanaman hias, dan memanfaatkan kolam untuk ikan. Semenjak dijalankan program Agam menyemai sudah tersebar ke 82 nagari dan juga bermamfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta pelestarian lingkungan hidup.”

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa program yang dilakukan pada masa pemerintahan Indra Catri membangun dan memotivasi melalui suatu gerakan moral penyemaian nilai-nilai kebaikan. Program agam menyemai yang dilakukan dengan cara mamfaatkan lahan pekarangan, lahan mesjid dan lahan yang tidak produktif dengan menanam sayuran dan tanaman. Semenjak adanya program agam menyemai maka sudah tersebar ke 82 nagari serta juga dapat meningkatkan pengetahuan serta pelestarian lingkungan hidup.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan Perpres membawa pengaruh yang efisien terkait dengan mealukan percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

⁵⁰Lihat wawancara peneliti dengan Indra Catri selaku Bupati Agam Tanggal 8 Februari 2017 di Rumah Dinas Bupati pukul 15.00 wib

Penentuan prioritas intervensi kebijakan dilakukan dengan menganalisis determinan kemiskinan (masalah pokok kemiskinan) dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kondisi umum kemiskinan. Determinan kemiskinan secara umum terkait dengan ketidak akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar yang lain. Selain itu determinan kemiskinan juga terkait dengan tidak terpenuhinya akses terhadap infrastruktur dasar dan akses terhadap aset produktif, dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.

Hal itu juga diakui oleh Martias Wanto sebagai berikut⁵¹:

“Prinsip Kegiatan Agama menyemai perlu partisipatif secara menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komperensif, sebab program agama menyemai ini pada intinya kita telah melakukan penyemaian terhadap masyarakat kita. Kabupaten Agama telah mampu menerapkan program Agama Menyemai sehingga program itu perekonomian masyarakat meningkat signifikan, dan mudah-mudahan peningkatan itu bisa terus berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.”

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa agama menyemai memiliki prinsip bahwa perlunya partisipatif secara menyeluruh dan berkelanjutan secara terencana dan terus menerus. Karena program menyemai tersebut intinya adalah memberikan penyemaian terhadap masyarakat. Terbukti bahwa program agama menyemai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan jika terus dilanjutkan maka kesejahteraan dapat tercapai.

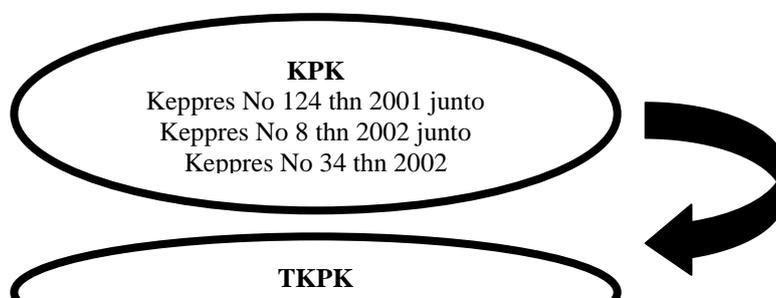
Berdasarkan teori tipe pilihan *instrument* atau alat kebijakan apa yang digunakan dalam struktur pemerintahan sebagai *instrument* kebijakan atau alat-alat lainnya. Pada masa pemerintahan Indra Catri melakukan inovasi dengan membuat program Agama menyemai yang belum dilakukan sebelumnya oleh masa

⁵¹Lihat wawancara peneliti dengan Martias Wanto selaku Sekda Kabupaten Tanggal 6 Februari 2017 di Kantor Bupati pukul 14.30 wib

pemerintahan Aristo Munandar. Tujuan dari program agam menyemai yaitu memupuk budaya menanam bagi setiap individu masyarakat untuk memanfaatkan beberapa lahan yang ada. Disamping itu dengan gerakan ini juga dapat memupuk budaya menanam bagi setiap individu mulai dari anak-anak sampai dewasa dan memotivasi masyarakat untuk sadar terhadap pentingnya pohon bagi kehidupan. Penanaman kembali berbagai jenis tanaman dan bibit ikan merupakan solusi yang efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup serta ilmu tentang kesehatan.

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi berasal dari dalam masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya seperti tingkat pendidikan dan dan produktifitas yang keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya akses terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan akses masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi untuk menunjang kehidupannya. merupakan fenomena yang kait mengait antara satu kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan fenomena yang kait mengait antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Oleh karena itu mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada dibalik kemiskinan tersebut.

3. Pergantian pemimpin tidak merubah Kebijakan Secara Signifikan





Strategi Kebijakan Untuk Mempercepat Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan masa Pemerintahan Aristo Munandar dan Indra Catri.

1. Memperkuat Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
2. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid

3. Menyatukan Visi, Misi dan Persepsi antara Pemerintah Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Membangun komunikasi yang harmonis dan berkesinambungan antara pemerintah dengan warga Agam diperantauan, tokoh masyarakat, dan para ahli di Perguruan Tinggi serta dengan lembaga profesional lainnya.

Program Kebijakan Untuk Mempercepat Koordianasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan masa Pemerintahan Aristo Munandar dan Indra Catri.

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas program- program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan masa Pemerintahan Aristo Munandar dan Aristo Munandar.

a. Pasal 2

1. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam.
2. Penanggulangan kemiskinan diselenggarakan secara terkoordinasi.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

b. Pasal 3

1. Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut :
 - a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial (selanjutnya disingkat BPS), yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disingkat PM), yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (selanjutnya disingkat PUEMK), terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Tabel 5.3
Indikator Penanggulangan Kemiskinan Aristo Munandar

Indikator Penanggulangan Kemiskinan		Kinerja Positif	Batas		Sumber
Indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan	Tingkat kemiskinan	Lebih rendah atau sama dengan	10	%	RPJMN 2005-2009 Buku I
	Tingkat pengangguran	Lebih rendah atau sama dengan	7,6	%	RPJMN 2005-2009 Buku I
Indikator sektor kesehatan	Angka kematian bayi	Lebih rendah atau sama dengan	35	per 1000 KH	RPJMN 2005-2009 Buku I
	Angka kematian balita	Lebih rendah atau sama dengan	44	per 1000 balita	MDGs
	Angka kematian ibu melahirkan	Lebih rendah atau sama dengan	120	per 1000 pendk perempuan	RPJMN 2005-2009 Buku I
	Prevalensi balita kekurangan gizi	Lebih rendah atau sama dengan	10	%	RPJMN 2005-2009 Buku I

Indikator sektor pendidikan	Angka partisipasi kasar	Lebih tinggi atau sama dengan	97	%	MDGs
	Angka partisipasi murni	Lebih tinggi atau sama dengan	98	%	RPJMN 2005-2009 Buku I
	Angka melek huruf	Lebih tinggi atau sama dengan	98	%	MDGs
	Angka putus sekolah	Lebih tinggi atau sama dengan	7	%	Permendiknas Nomor 129 Tahun 2007
Indikator Infrastruktur dasar	Akses sanitasi layak	Lebih tinggi atau sama dengan	82,3	%	MDGs
	Akses air minum layak	Lebih tinggi atau sama dengan	77	%	Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Kepmen Menti Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2005
Indikator ketahanan pangan	Perkembangan harga beras	Menurun	Menurun		RPJMN 2005-2009 Buku I
	Perkembangan harga kebutuhan pokok utama	Menurun	Menurun		RPJMN 2005-2009 Buku I

Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Agam 2006-2010

Tabel 5.4

Indikator Penanggulangan Kemiskinan Indra Catri

Indikator Penanggulangan Kemiskinan	Kinerja Positif	Batas	Sumber
-------------------------------------	-----------------	-------	--------

Indikator kemiskinan dan ketenagakerjaan	Tingkat kemiskinan	Lebih rendah atau sama dengan	8	%	RPJMN 2010-2014 Buku I
	Tingkat pengangguran	Lebih rendah atau sama dengan	5.4	%	RPJMN 2010-2014 Buku I
Indikator sektor kesehatan	Angka kematian bayi	Lebih rendah atau sama dengan	24	per 1000 KH	RPJMN 2010-2014 Buku I
	Angka kematian balita	Lebih rendah atau sama dengan	32	per 1000 balita	MDGs
	Angka kematian ibu melahirkan	Lebih rendah atau sama dengan	118	per 1000 pendk perempuan	RPJMN 2010-2014 Buku I
	Prevalensi balita kekurangan gizi	Lebih rendah atau sama dengan	15	%	RPJMN 2010-2014 Buku I
Indikator sektor pendidikan	Angka partisipasi kasar	Lebih tinggi atau sama dengan	100	%	MDGs
	Angka partisipasi murni	Lebih tinggi atau sama dengan	96	%	RPJMN 2010-2014 Buku I
	Angka melek huruf	Lebih tinggi atau sama dengan	100	%	MDGs
	Angka putus sekolah	Lebih tinggi atau sama dengan	5	%	Permendiknas Nomor 129 Tahun 2014
Indikator Infrastruktur dasar	Akses sanitasi layak	Lebih tinggi atau sama dengan	81.8	%	MDGs

	Akses air minum layak	Lebih tinggi atau sama dengan	75	%	Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Kepmen Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2010
Indikator ketahanan pangan	Perkembangan harga beras	Menurun	Menurun		RPJMN 2010-2014 Buku I
	Perkembangan harga kebutuhan pokok utama	Menurun	Menurun		RPJMN 2010-2014 Buku I

Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Agam 2011-2015

Dari tabel diatas terlihat perbandingan mengenai indikator dalam penanggulangan kemiskinan,, terdapat persamaan program namun pada masa pemerintahan Indra Catri lebih meningkat dari pada pemerintahan Aristo Munandar. Terlihat dari indikator pengangguran dan ketenagakerjaan pada masa pemerinthan Indra CAtri dapat diperkecil. Begitu jugan dengan sektor kesehatan dpat diperbaiki dengan baik oleh masa pemerintahan Indra Catri.

Mengenai hal ini, Aristo Munandar menjelaskan bahwa pemerintah berperan cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan⁵².

“Pemerintah dalam hal ini berperan dalam membuat dan melaksanakan program sedangkan pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan. Adanya dana CSR dari Swasta, yaitu kebijakan dana tanggung jawab sosial untuk kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Agam. serta berkontribusi dalam proses pembangunan program pemerintahan seperti bantuan dana seperti adanya KSBMT, yaitu memberikan dana kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha⁵³”.

⁵²Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

⁵³Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

Berdasarkan wawancara di atas peneliti memahami bahwa pihak swasta juga dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan. Adanya dana CSR dari pihak swasta juga diperlukan untuk dimanfaatkan untuk BMT yaitu berbentuk pinjaman dana diberikan kepada masyarakat sebagai modal usaha.

Sedangkan tanggapan dari Indra Catri dalam penanggulangan angka kemiskinan dengan pihak swasta⁵⁴.

“Tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya bahwa pemerintahan saat ini juga memanfaatkan dana CSR dari pihak perusahaan swasta khusus dan tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini pemerintah juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat agar masyarakat lebih mandiri dan kreatif sehingga dengan begitu penanggulangan kemiskinan dapat teratasi.”

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa pada masa pemerintahan Indra Catri juga memanfaatkan dana CSR dari pihak swasta dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Inovasi yang dilakukan oleh masa pemerintahan yaitu dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan pemberdayaan untuk lebih mandiri dan kreatif dengan begitu penanggulangan kemiskinan dapat teratasi.

Berdasarkan hal diatas bahwa terlihat persamaan mengenai perlu pihak swasta dalam program penanggulangan kemiskinan yaitu adanya dana CSR yang diberikan kepada pemerintah untuk di mamfatkan kepada masyarakt untuk pinjaman dan modal usaha namun terlihat perbedaan ketika pada masa pemerintahan Indra Catri untuk pemberdayaan.

⁵⁴Lihat wawancara peneliti dengan Indra Catri selaku Bupati Agam Tanggal 8 Februari 2017 di Rumah Dinas Bupati pukul 15.00 wib

Hal itu dijelaskan oleh Aristo Munandar yang menjelaskan program yang dirancang saat dia menjabat⁵⁵.

“Ada beberapa program lain untuk mengurangi angka kemiskinan pada saat pemerintahan saya. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Agam *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), Setiap program diadakan rapat terlebih dahulu dengan dinas pendidikan, dinas sosial pakai data base, mengadakan rapat agar program berjalan dengan lancar. KSBMT merupakan program kemiskinan, dengan memberikan bantuan, di berikan motor kredit dan mengajak anak tersebut memiliki pekerjaan dan dapat bersekolah. Adakan temu rapat dalam melihat dilapangan dengan camat. KSBMT 300 jt per RT. Namun saat ini menurun kemiskinan hanya angka dengan menggunakan data BPS karena data BPS bersifat sampling, Adanya kegiatan makmur bersama mesjid kegiatan dilakukan persuku dan di sertai niniak mamak, setiap kegiatan di lakukan di dalam mesjid”.

Berdasarkan hal diatas peneliti memahami bahwa ada program lain yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya program BMT, sebelum melakukan program maka pemerintah melakukan rapat terlebih dahulu dengan berbagai anggota dinas diantaranya dinas pendidikan dan dinas sosial dengan memakai dat base. Salah satu program tersebut diberikan kepada masyaakat yaitu dengan memberikan kredit motor kemudian motor tersebut digunakan untuk berjualan sehingga anak dari masyarakat tersebut dapat bersekolah dan juga bekerja. Namun program unggulan berbasis mesjid diterapkan dalam masa pemerintahan Aristo Munandar.

Mengenai hal ini, Aristo Munandar menjelaskan bahwa pemerintah berperan cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan⁵⁶.

⁵⁵Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

⁵⁶Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agam (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

“Dahulunya saat saya menjabat penanganan kemiskinan bersentuhan dengan masyarakat miskin, memberikan bantuan sesuai sasaran yaitu by name, by adress. Data harus by name by adress , masalah pendataan harus terperinci. Kegiatan koperasi untuk BMT, menggerakkan partisipasi rakyat. Program pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat harus menggerakkan civil society, harus adanya kesamaan pandang antara masyarakat dan pemerintah. Kemiskinan merupakan gerakan dari bawah, Agama makmur merupakan program unggulan caranya dengan mengumpulkan masyarakat ke mesjid mengundang niniak mamak untuk melakukan musyawarah untuk melaksanakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut disebut mamak yaitu musyawarah syarak nagari. Keberhasilan semua pihak dalam mengurangi angka kemiskinan bukan cuma pemerintah⁵⁷”.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti memahami bahwa masa pemerintahan Aristo Munandar mempunyai strategi khusus dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu Kemiskinan berbasis mesjid, beliau mengumpulkan masyarakat seperti niniak mamak persuku dengan melakukan musyawarah untuk program apa saja yang dilakukan, bagi masyarakat yang tidak hadir ke mesjid tersebut maka tidak akan dapat dalam menjalankan program yang telah di musyawarahkan.

Adapun tanggapan Bupati Agama Indra Catri menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan peranan yang cukup besar dalam penanggulangan angka kemiskinan⁵⁸.

“Program yang kami lakukan yaitu program agama menyemai, dengan memberikan nilai-nilai kebaikan dalam memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan lainnya untuk ditanam bibit sayuran maupun buah-buahan agar masyarakat dapat bercocok tanam dan hasil tersebut dapat digunakan sendiri maupun untuk dijual, serta memberikan bibit ikan untuk mengisi kolam-kolam yang selama ini blum dimanfaatkan. Dengan program tersebut tentunya membawa manfaat dan pendapatan ekonomi baik di lingkungan sendiri maupun lingkungan masyarakat lainnya”.

⁵⁷Lihat wawancara peneliti dengan Aristo Munandar selaku Bupati Agama (2005-2010) Tanggal 6 Februari 2017 di Siteba pukul 08.40 wib

⁵⁸Lihat wawancara peneliti dengan Indra Catri selaku Bupati Agama Tanggal 8 Februari 2017 di Rumah Dinas Bupati pukul 15.00 wib

Berdasarkan hal di atas peneliti memahami bahwa Program agam menyemai selain memberikan bibit tanaman maupun sayuran kepada masyarakat akan tetapi juga terdapat nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan kepada masyarakat. Masyarakat juga memanfaatkan kolam yang digunakan untuk dimasukan ikan yang nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan.

Hasil dari penelitian bahwa perbedaan pada pemerintah pada masa pemerintahan Aristo Munandar dan Indra Catri tidak merubah kebijakan secara signifikan seperti yang dijelaskan di tabel berikut.

Tabel 5.5

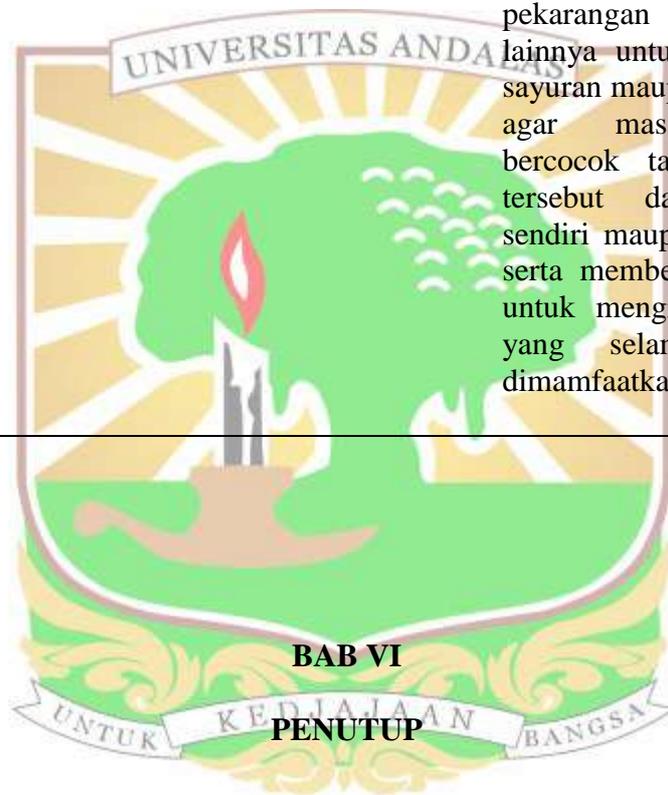
Perbandingan Strategi Kebijakan Aristo Munandar dan Indra Catri

No	Strategi Kebijakan	Persamaan	Perbedaan
1	Pilihan Wilayah Cakupan	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membutuhkan peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam menjalankan program strategi kebijakan - Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam proses strategi kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data berdasarkan by name by adress pada masa Aristo Munandar - Melakukan pemberdayaan bibit kepada masyarakat
2	Pilihan Instrumen Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Lanjutan dari beberapa program penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Unggulan Agam Makmur pada masa pemerintahan Aristo Munandar. Kemiskinan berbasis mesjid, beliau mengumpulkan masyarakat

-
- Membentuk TKPK

seperti iniak mamak persuku dengan melakukan musyawarah untuk program apa saja yang dilakukan, bagi masyarakat yang tidak hadir ke mesjid tersebut maka tidak akan dapat dalam menjalankan program yang telah di musyawarahkan.

- Program agam menyemai, dengan memberikan nilai-nilai kebaikan dalam memafaatkan lahan pekarangan maupun lahan lainnya untuk ditanam bibit sayuran maupun buah-buahan agar masyarakat dapat bercocok tanam dan hasil tersebut dapat digunakan sendiri maupun untuk dijual, serta memberikan bibit ikan untuk mengisi kolam-kolam yang selama ini blum dimamfaatkan



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap bagaimana Perbandingan Strategi Kebijakan mengurangi angka kemiskinan berdasarkan periode 2005-2010 dan 2010-2015 maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Agam.

Berdasarkan wilayah cakupan pemerintahan yang dipimpin oleh Aristo Munandar dan Indra Catri pada periode 2005-2010, dan 2010-2015 terdapat persamaan. Adapun Kesamaan yang nampak terlihat dari pembuatan kebijakan dalam sangat bermanfaat khususnya pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan, Namun dalam penanggulangan kemiskinan juga ada perlibatan *stakeholder*, sehingga penanggulangan kemiskinan kiranya bukan hanya tanggungjawab sepenuhnya Pemerintahan Daerah namun juga semua pihak terutama masyarakat miskin itu sendiri. Disini terlihat bahwa peran dari pemerintah sangat berguna dari pada swasta. Namun ada inovasi pada pemerintahan Indra Catri dengan melakukan pemberdayaan agam menyemai yang menjadi program unggulan yaitu agam menyemai.

Berdasarkan pilihan-pilihan instrumen kebijakan yang dipimpin oleh Aristo munandar dan Indra Catri periode 2005-2010 dan 2010-2015. Terdapat perbedaan antara lain program unggulan yang dijalankan yaitu pada masa pemerintahan Aristo Munandar yaitu Agam makmur sedangkan pada masa pemerintahan Indra Catri yaitu Program Agam menyemai yaitu memberikan nilai-nilai kebaikan dalam memafaatkan lahan pekarangan maupun lahan lainnya untuk ditanam bibit sayuran maupun buah-buahan agar masyarakat dapat bercocok tanam serta bibit ikan.

Permasalahan mengenai kemiskinan menjadi permasalahan yang multidimensi, berbagai upaya oleh pemerintah telah dilakukan guna menanggulangi kemiskinan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan

mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan kebijakan pusat yang kemudian diterjemahkan pada level propinsi dan kota/kabupaten. Dalam implementasinya banyak variabel yang mempengaruhi kebijakan tersebut, sehingga berdampak pada proses maupun output kebijakan itu sendiri.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

Pemerintah harus memperhatikan beberapa hal mengenai masalah kemiskinan dengan melakukan inovasi dalam program penanggulangan kemiskinan. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan meningkatkan pelayanan dan melakukan evaluasi program yang telah dijalankan.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih banyak kekurangan dalam pembahasan, pada penelitian selanjutnya tidak hanya strategi mengurangi angka kemiskinan tetapi juga meningkatkan sektor-sektor di bidang lainnya. Hubungkan dengan kebijakan ekonomi di bidang perindustrian. Penelitian selanjutnya juga di kembangkan mengenai batasan masalahnya. Terakhir dalam masalah perbandingan di gunakan teori yang lebih mendalam dalam melihat perbandingan dalam mengurangi angka kemiskinan.

